

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj)**

TAHUN ANGGARAN 2020



Disnakerind
Tanah Laut

**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

JL. A. SYAIRANI, PELAIHARI TELP. (0512) 21165

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) ini disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggung jawab pelaksanaan kinerja untuk Tahun 2020.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut di masa - masa mendatang..... Aamiin.

Pelaihari, 28 Januari 2021

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tentang capaian kinerja, sasaran selama tahun 2020 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategik tahun 2018-2023 dan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2020.

Pada Tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut menetapkan 14 (empat belas) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 10.782.249.285,-** dan realisasi sebesar **Rp. 7.950.804.777,-** atau sebesar 73,74 %. Secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2020 sudah cukup baik.

Demikian dengan disusunnya LAPKIN ini dapat memberikan informasi dan manfaat serta evaluasi dalam pengambilan keputusan guna lebih mendorong peningkatan kinerja maupun kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Tanah Laut dimasa yang akan datang.

Pelaihari, 28 Januari 2021

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
 PENDAHULUAN.....	 1
BAB I A. LATAR BELAKANG.....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI.....	2
C. PRODUK DAN LAYANAN..	12
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	15
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	 17
A. VISI RPJMD.....	17
B. MISI RPJMD.....	19
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	21
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	24
E. PERJANJIAN KINERJA 2020.....	25
F. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	32
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 35
A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI.....	35
1. SASARAN RPJMD.....	35
2. ESELON II	47
3. ESELON III	48
1) ESELON IV (KASUBBAG UMUM)	48
2) ESELON IV (KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	49
3) ESELON IV (KASUBBAG TATA USAHA UPT. BLK)	49
4. ESELON III (KEPALA BIDANG P2TK)	50
1) ESELON IV (KASI PENEMPATAN TENAGA KERJA)	50
2) ESELON IV (KASI PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS).....	50
3) ESELON IV (KASI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA).....	51
4) ESELON IV (KEPALA UPT. BLK)	51

5. ESELON III (KEPALA BIDANG HIJSTK)	51
1) ESELON IV (KASI PERSYARATAN KERJA)	52
2) ESELON IV (KASI PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA)	52
3) ESELON IV (KASI HUBUNGAN INDUSTRIAL)	52
6. ESELON III (KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN)	53
1) ESELON IV (KASI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI)	53
2) ESELON IV (KASI SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI) .	53
3) ESELON IV (KASI PEMBERDAYAAN INDUSTRI)	54
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	88
1. ANGGARAN DAN REALISASI APBD 2020	88
2. ANGGARAN DAN REALISASI MENURUT SASARAN DAN PROGRAM	92
3. PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 DAN 2020	96
 BAB IV PENUTUP.....	 102
A. KESIMPULAN	102
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA.....	103
 LAMPIRAN :	 104
1. IKU	
2. PERNYATAAN HASIL REVIU	
3. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	
4. CASCADING/ POHON KINERJA	
5. CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN (1-4)	
6. MONEV RENSTRA	
7. MATRIK KESELARASAN	
8. SK TIM PENYUSUN LAKIP	
9. SOP PENYUSUNAN LAKIP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah juga Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan yang baik untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan Tap. MPR RI No. 11 MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas tertib penyelenggaraan Negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas dan Asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai Pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi tujuan organisasi dan sebuah tekad seluruh Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah

Laut untuk mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut

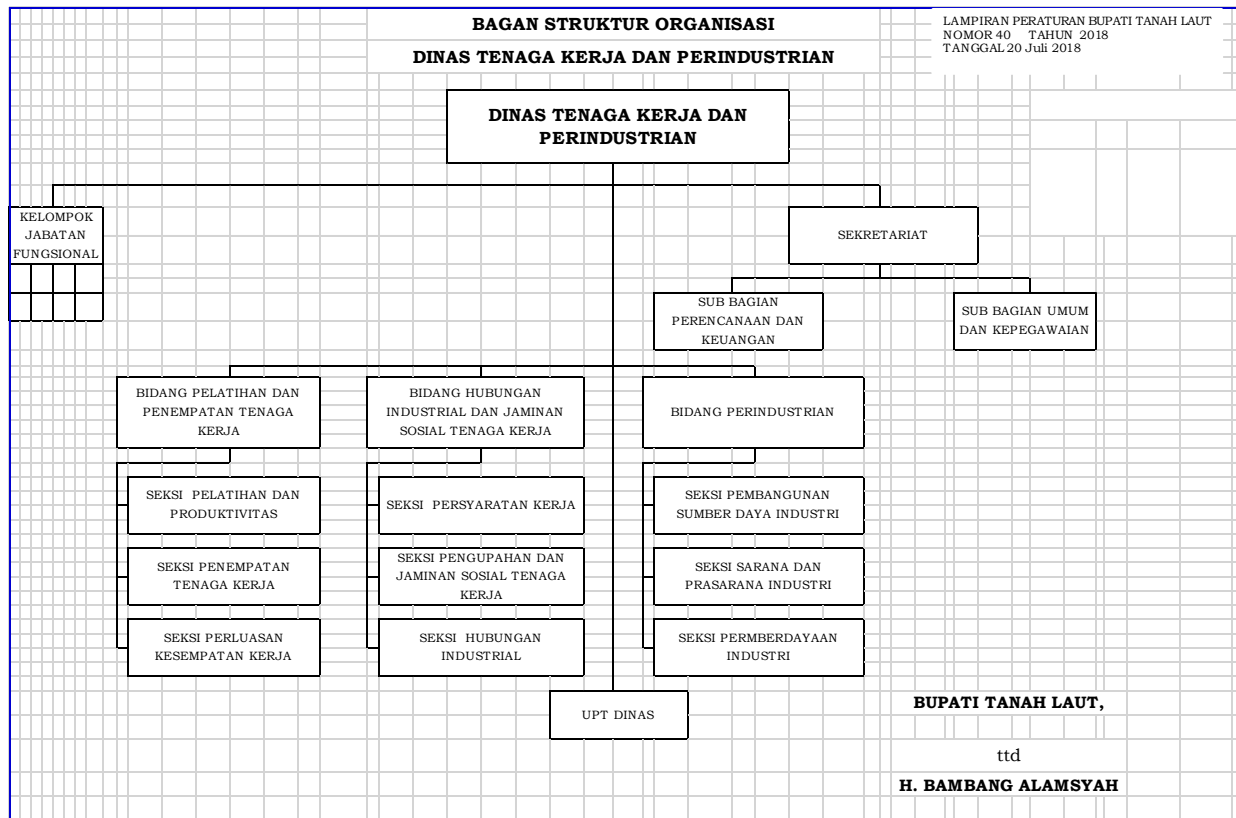
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian serta bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut melalui Sekretaris Daerah.

A. Gambaran Umum SKPD.

a) Struktur Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terdiri dari :
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
 - 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - 3) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari:
 - 1) Seksi Persyaratan Kerja;
 - 2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - 3) Seksi Hubungan Industrial.
 - e. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;

- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Industri; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan Industri.
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

Tugas Pokok Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan tugaspembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Tanah Laut mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- f. pelaksanaan administrasi dinas;
- g. pembinaan UPT Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya..

Dinas Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri :

A. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

B. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:

- 1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
- 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
- 3) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.

C. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari:

- 1) Seksi Persyaratan Kerja;
- 2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
- 3) Seksi Hubungan Industrial.

D. Bidang Perindustrian, terdiri dari:

- 1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Industri; dan
- 3) Seksi Pemberdayaan Industri.

E. UPT Dinas; dan

F. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya, tugas pokok pada Disnakerind Kabupaten Tanah Laut diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan manajemen dan pengendalian di bidang Tenaga Kerja, dan Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, menyelenggarakan mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sesuai dengan kewenangannya ;
- b. Memimpin, mengarahkan, merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, dan perindustrian ;
- c. Merumuskan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, dan perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Melaksanakan pembinaan teknis pendidikan pelatihan kerja
- e. Melaksanakan pembinaan teknis pengendalian dan pengawasan hubungan industrial dan syarat kerja
- f. Melaksanakan kemitraan dalam peningkatan kualitas keahlian tenaga kerja
- g. Melaksanakan pembinaan teknis tenaga kerja asing
- h. Melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis daerah
- i. Membuat laporan kinerja bidang perhubungan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya kepada sekretaris daerah
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Disnakerind Kabupaten Tanah Laut mempunyai Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan perencanaan program Bidang tenaga kerja, dan perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. penyusunan prosedur tetap dan mekanisme kerja Bidang tenaga kerja, dan perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian secara teknis Bidang tenaga kerja, dan perindustrian yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- d. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- e. pengkoordinasian perencanaan program Bidang Ketenagakerjaan, dan Perindustrian dengan instansi vertikal di daerah;
- f. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait guna pengawasan dan pengevaluasian dan penilaian pelaksanaan program Bidang Ketenagakerjaan, dan Perindustrian;
- g. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan dunia usaha guna pengawasan dan pengevaluasian dan penilaian pelaksanaan program Bidang Ketenagakerjaan, dan Perindustrian;
- h. penyelenggaraan Kesekretariatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - b. koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
 - d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

- e. koordinasi dan penyusunan Produk Hukum Daerah dibidang tenaga kerja dan perindustrian;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/ jasa;
- g. koordinasi pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Bidang PPTK

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4. Bidang HIJSTK

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5. Bidang Perindustrian

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;

- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- f. pelaksanaan administrasi bidang perindustrian;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

C. ISU STRATEGIS

Ada beberapa isu strategis terkait pembangunan ketenagakerjaan, dan perindustrian.

Isu Strategis Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian antara lain :

1. **Peningkatan pelayanan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan untuk kompetensi tenaga kerja untuk mewujudkan Program Unggulan 500 Orang Siap Kerja .**

Pelatihan kerja sebagai keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan. Melalui pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian perlu mendorong terbentuknya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

swasta selain UPT BLK yang sudah ada. Lembaga-lembaga tersebut perlu program penguatan kelembagaan, standarisasi kompetensi, peningkatan kualitas instruktur dan tenaga pelatihan. Bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), lembaga pendidikan menengah dan lembaga pendidikan tinggi dalam program pemagangan.

2. Peningkatan Pelayanan penempatan tenaga kerja.

Pelayanan penempatan tenaga kerja dipandang sebagai proses kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, sementara pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai kebutuhannya. Peningkatan pelayanan tersebut dibangun melalui pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu (SISNAKER TERPADU) sebagai kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumberdaya manusia, perangkat keras, perangkat lunak dan substansi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja, pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan. Dalam pelayanan penempatan tenaga kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk menyelenggarakan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten, penerbitan ijin LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta) daerah Kabupaten, pengelolaan IPK (Informasi Pasar Kerja) dan pemberian tanda daftar BKK (Bursa Kerja Khusus).

Pembinaan terhadap LPTKS dan BKK perlu diintensifkan mengingankan urgensi dan cakupan layanan dapat diperluas, karena BKK dapat dibentuk pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja.

Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sedang membahas draft Raperda tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) dan retribusi perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

3. Perlindungan ketenagakerjaan melalui peningkatan jumlah peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun luar hubungan kerja, diperlukan jaminan sosial sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pemerintah daerah turut mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan kepada para pekerja formal, tenaga kerja informal (mandiri), Perangkat Desa, tenaga non ASN (PTT) dan tenaga kerja konstruksi, berdasarkan MoU antara pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut dengan BPJS Ketenagakerjaan cabang Banjarmasin.

4. Harmonisasi hubungan industrial melalui peningkatan jumlah penyelesaian kasus melalui Perjanjian Bersama (PB).

Meningkatnya jumlah sengketa atau perselisihan hubungan industrial menuntut upaya maksimal tenaga fungsional mediator HI, agar penyelesaian perselisihan dapat dicapai melalui Perjanjian Bersama (PB) sebelum pilihan terakhir melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sampai saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut belum memiliki tenaga fungsional mediator, sehingga pelayanan penanganan perselisihan HI bekerja sama dengan tenaga mediator di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Selatan. Selain itu untuk meningkatkan harmonisasi hubungan industrial dilakukan melalui pembinaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartite, deteksi dini penanganan mogok kerja, PHK, dan penutupan perusahaan.

5. Peningkatan Industri kecil dan menengah

Kebijakan yang berpihak kepada IKM mendorong pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan, meliputi perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas bagi IKM. Dalam rangka mewujudkan pembangunan industri daerah dilakukan melalui strategi pemanfaatan potensi bahan baku, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreatifitas.

Pemerintah Daerah menggalakkan program penumbuhan wirausaha baru. Dengan meningkatnya jumlah wirausaha baru, maka diharapkan juga meningkatnya jumlah IKM di Kab. Tala . tindak lanjut dari meningkatnya IKM

dan jumlah perusahaan, maka jumlah IKM yang terfasilitasi TDI dan IUI juga turut bertambah.

6. Terbangunnya kawasan industri Jorong

Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Peraturan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, bahwa Kawasan Industri Jorong masuk dalam proyek Strategis Nasional (PSN). Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi dalam pembuatan master plan dan RDTR.

7. Tumbuhnya sentra IKM

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM), berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 bahwa disetiap wilayah Kabupaten terutama di luar Pulau Jawa memiliki minimal satu sentra IKM, yang dapat berada didalam atau di luar Kawasan Industri. Pada Tahun 2019 melalui dana DAK telah dibangun Gedung Sentra IKM di Kecamatan Tambang Ulang, dan pada Tahun 2021 direncanakan pembangunan Sentra IKM Hasil Laut di Kecamatan Panyipatan.

C.PRODUK DAN LAYANAN

Produk dan layanan yang dihasilkan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut dalam bidang Ketenagakerjaan, dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

A. Bidang PPTK

1. Jenis Pelayanan

Pelayanan publik yang diberikan oleh Bidang PPTK berupa :

- a. Pembuatan Kartu Pencari Kerja/ AK 1
- b. Rekomendasi Penempatan TKI ke Luar Negeri
- c. Pemberian Ijin Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK)

2. Prosedur Pelayanan

a. Pembuatan Kartu Pencari Kerja/ AK 1

- 1) Pencari Kerja menyerahkan persyaratan, diantaranya :
 - Fotocopy Ijazah dan Transkrip nilai dari SD s/d Pendidikan terakhir.
 - Fotocopy KTP/ keterangan domisili
 - Fotocopy sertifikat keterampilan (jika ada)
 - Fotocopy surat pengalaman kerja (jika ada)
 - Pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
- 2) Pencari kerja mengisi data (identitas) di buku agenda/ database pencari kerja sesuai dengan tingkat pendidikan.
- 3) Petugas memverifikasi berkas pencari kerja.
- 4) Petugas mewawancarai dan menginput/ mengentry data pencari kerja ke website resmi Kemenakertrans RI yaitu :
<http://www.infokerja.depakertrans.go.id>
- 5) Petugas mengambil photo pencari kerja
- 6) Petugas mencetak kartu pencari kerja
- 7) Petugas antar kerja menandatangani kartu pencari kerja/ AK 1
- 8) Petugas melegalisir kartu pencari kerja yang sudah digandakan (fotocopy) oleh pencari kerja dan menyerahkan kembali kepada pencari kerja.

b. Rekomendasi Penempatan TKI ke luar negeri (SISKOTKLN)

- 1) PPTKIS dan calon TKI (CTKI) menyerahkan dokumen kelengkapan yang meliputi :
 - CTKI harus dihadirkan
 - KTP, Ijazah, Akte kelahiran/ Surat kenal lahir, Kartu keluarga (KK)
 - Surat ijin suami/ isteri, orang tua atau wali diketahui oleh RT/ Lurah/ Kades
 - Perjanjian penempatan TKI
 - Perjanjian Kerja (PK)
- 2) Persetujuan dari Kepala Dinas
- 3) Uji Kelayakan Kepatutan CTKI yang meliputi :
 - a. Uji baca tulis bagi yang tidak tamat SD

- b. Skill/ keterampilan yang dimiliki
- 4) Menginput data CTKI Online melalui website resmi BNP2TKI yaitu SPPTKLN atau SISKOTKLN dengan mengakses :
<http://www.bnp2tki.go.id> atau <http://siskotkln.bnp2tki.go.id>
- 5) Penandatanganan rekomendasi paspor CTKI dan berita acara CTKI oleh Kepala Dinas
- 6) Penyerahan berkas.

B. Bidang HIJSTK

Pelayanan publik yang diberikan oleh Bidang HIJSTK berupa :

- a. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
- b. Pengesahan Peraturan Perusahaan
- c. Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama
- d. Pencatatan Pelaporan Pekerjaan Pemborongan dan Jenis Pekerjaan Penunjang
- e. Pencatatan Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh
- f. Pencatatan LKS Bipartit
- g. Pencatatan PHK
- h. Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial

C. Bidang Perindustrian

Pelayanan publik yang diberikan oleh Bidang Perindustrian berupa :

- a. Rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI)
- b. Fasilitas Standarisasi Industri (IUMK OSS, Halal, Hak Kekayaan Industri)
- c. Fasilitas Pendaftaran Program Kartu Prakerja bagi IKM Terdampak Covid-19
- d. Fasilitas Pendaftaran Program Pelatihan dan Pemberdayaan Industri yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Kalsel melalui aplikasi Si Manis
- e. Pembinaan dan Pemberdayaan Industri melalui Program Pelatihan dan Pemagangan serta Pendampingan IKM dalam rangka mengakses Program Bantuan Permodalan melalui Gapura Karomah.

D. UPT BLK

Pelayanan publik yang diberikan oleh UPT. BLK berupa :

- a. Menerima pendaftaran dan melaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi di UPT. BLK.
- b. Menerima pendaftaran dan melaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi di desa-desa dan kecamatan.
- c. Menerima pendaftaran dan melaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi di Balai-Balai Besar Kementerian Tenaga Kerja.
- d. Menerima permintaan dan melaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi di perusahaan kerja/ kerja sama dengan pihak ketiga.
- e. Pemanggil peserta yang sudah mendaftar melalui via telp. dan sms.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

1. KATA PENGANTAR
2. IKHTISAR EKSEKUTIF
3. DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja 2020
- F. Program dan Kegiatan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 1. Sasaran RPJMD
 2. Eselon II (Kepala Dinas)
 3. Eselon III (Sekretaris)
 - 1) Eselon IV (Kasubbag Umum)
 - 2) Eselon IV (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)
 - 3) Eselon IV (Kasubbag Tata Usaha UPT. BLK)
 4. Eselon III (Kepala Bidang P2TK)
 - 1) Eselon IV (Kasi Penempatan Tenaga Kerja)
 - 2) Eselon IV (Kasi Pelatihan dan Produktivitas)
 - 3) Eselon IV (Kasi Perluasan Kesempatan Kerja)
 - 4) Eselon IV (Kepala UPT. BLK)
 5. Eselon III (Kepala Bidang HIJSTK)
 - 1) Eselon IV (Kasi Persyaratan Kerja)

- 2) Eselon IV (Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja)
- 3) Eselon IV (Kasi Hubungan Industrial)
- 6. Eselon III (Kepala Bidang Perindustrian)
 - 1) Eselon IV (Kasi Pembangunan Sumber Daya Industri)
 - 2) Eselon IV (Kasi Sarana dan Prasarana Industri)
 - 3) Eselon IV (Kasi Pemberdayaan Industri)

C. Akuntabilitas Keuangan

- 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2020
- 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
- 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2020

Bab IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN

- 1) IKU
- 2) Pernyataan Hasil Reviu Tahun 2019
- 3) Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- 4) Pohon Kinerja
- 5) Capaian Kinerja Triwulan I s.d IV
- 6) Monev Renstra
- 7) Matrik Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tanah Laut, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2018–2023 adalah:

Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

INOVASI : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat ter-

hadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus kembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

- TERTATA : Secara umum, makna “tertata” adalah *tertib administrasi dan tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.
- RELIGIUS : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.
- AKTUAL : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- SINERGI : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi

baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

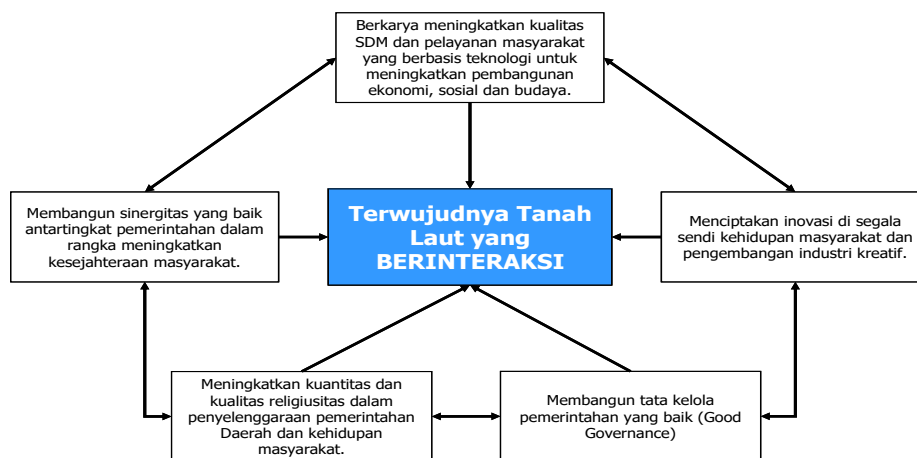
Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut. Aspek INOVASI diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat

dan pengembangan industri kreatif. Aspek TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat. Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara grafis, hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar dan Tabel di bawah ini.

Gambar Keterkaitan Visi dengan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023



Tabel

Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	
Pokok-Pokok Visi	MISI
BERKARYA	1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
INOVASI	2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
TERTATA	3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).
RELIGIUS	4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
AKTUAL SINERGI	5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian memiliki keunggulan-keunggulan atau kelebihan-kelebihan dan daya saing yang tinggi menuju “ **Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”.

Keunggulan ini dapat diwujudkan mempersyaratkan adanya potensi dan kompetensi untuk bisa lebih produktif, memiliki daya kreatif dan inovatif yang tinggi sesuai tuntutan lingkungan strategi yang senantiasa terus mengalami perubahan dan tumbuh kembang yang semakin dinamis dan kompleks. Lebih produktif berarti menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan, dan memiliki daya kreasi dan inovasi produk secara berkelanjutan yang tinggi, serta memiliki daya saing, baik daya saing komparatif maupun daya saing manfaat (*comparative and advantage competitive*) untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanah Laut menjadi masyarakat yang sejahtera dari segi ekonomi, serta rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat yang dilandasi dengan meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berkembangnya kehidupan demokrasi dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.

Kompetensi ini merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan, sikap dan perilaku serta etika yang diperlukan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan peran yang dimainkannya. Karenanya menuntut adanya “*Sense of responsibility and professionally*” dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan peran masing-masing. *Sense of responsibility*, menghendaki setiap pelaku kepentingan memiliki rasa bertanggung jawab, yakni mau dan mampu bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku, tindakan dalam bingkai melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya. Sementara *professionally* lebih mengarah pada kompetensi bagi setiap pelaku kepentingan. Kompetensi merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya.

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang diserahkan kepada SKPD. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
2. Meningkatkan Pelayanan Penempatan Kerja.
3. Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial.
4. Meningkatkan Kinerja Sektor Industri.

Keterkaitan Tujuan Renstra dengan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023:

- A. Untuk tujuan 1 : Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja selaras dengan **Misi 1** yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- B. Untuk Tujuan 2 dan 3 : Meningkatkan Pelayanan Penempatan Kerja dan Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial selaras dengan **Misi 5** yaitu Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- C. Untuk Tujuan 4 : Meningkatkan Kinerja Sektor Industri selaras dengan **Misi 2** yaitu Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dikelompokkan menurut urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dan ditindaklanjuti dengan renstra SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja** ” ditetapkan sasaran “Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja”.
2. Untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan Pelayanan Penempatan Kerja**” ditetapkan sasaran “Meningkatnya Pelayanan Penempatan Kerja”.
3. Untuk mencapai tujuan **Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial** ditetapkan sasaran “Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial “

4. Untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan Kinerja Sektor Industri.**” ditetapkan sasaran “Meningkatnya Kinerja Sektor Industri”.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disnakerind dapat dilihat pada table sebagai berikut :

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASA- RAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69.90%	70.30%	71%	71.12 %	71.90 %
2	Meningkatkan Pelayanan Penempatan Kerja	Meningkatnya Pelayanan Penempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	5.20%	5.50%	6%	6.20%	6.50%
3	Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	30%	25%	20%	15%	10%
4	Meningkatkan Kinerja Sektor Industri	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	13.50%	14.17%	14.87%	15.57 %	16.35 %

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN									
KABUPATEN TANAH LAUT									
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69.90%	70.30%	71%	71.12%	71.90%
2	Meningkatkan Pelayanan Penempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	Meningkatnya Pelayanan Penempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	5.20%	5.50%	6%	6.20%	6.50%
3	Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentasi penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentasi penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	30%	25%	20%	15%	10%
4	Meningkatkan Kinerja Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	13.50%	14.17%	14.87%	15.57%	16.35%

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key performance indicators (KPI)* dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan sehingga dalam penyusunan jelas, spesifik dan terukur (measurable) dan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Komitmen dan dukungan pimpinan dan stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen dalam menentukan sasaran dan tujuan, merupakan modal untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, yaitu :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber Data
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk 15 >}} \times 100\%$	Bidang PPTK dan UPT. BLK / BPS
2	Meningkatnya Pelayanan Penempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang tercatat}} \times 100\%$	Bidang PPTK
3	Hubungan Industrial harmonis dan kondusif	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan HI tahun } n-1 - (\text{jumlah kasus perselisihan tahun } n)}{\text{Jumlah kasus perselisihan HI tahun } n-1} \times 100\%$	Bidang HIPK
4	Meningkatnya kontribusi sektor industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	$\frac{\text{PDRB tahun } N - \text{PDRB tahun } N-1}{\text{PDRB Tahun } N} \times 100\%$	Bidang Industri/ BPS

E. PERJANJIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka pada tahun 2020 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah di tandatangani oleh Bupati Tanah Laut, Kepala Dinas dan Para Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	70,3 %
2	Meningkatnya pelayanan penempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	5,5 %
3	Hubungan industrial harmonis dan kondusif	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	25 %
4	Meningkatnya kontribusi sektor industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	14,17 %
5	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip Dinaskerind	BB (71)

2. Sekretaris

NO	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja SKPD	Nilai komponen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja pada LHE SAKIP SKPD	BB
2	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
3	Meningkatnya sarana dan prasarana serta sumber daya aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
4	Pemenuhan informasi pembangunan dan pelayanan SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik

3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

NO	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Pemenuhan pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan yang akuntabel	Jumlah dokumen dan laporan keuangan	- 2 Dokumen - 3 Jenis laporan
2	Pemenuhan perencanaan kerja tahunan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen
3	Sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja yang terukur dan akuntabel	Jumlah dokumen dan laporan kinerja	- 3 Dokumen - 2 Jenis Laporan

4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NO	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Fasilitasi penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah jenis bahan/ peralatan/ perlengkapan	35 Jenis
2	Fasilitasi Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Jumlah orang	1700 Orang
3	Fasilitasi penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Jumlah PTT	18 Orang
4	Penambahan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah jenis sarpras	4 Jenis
5	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah jenis sarpras	16 Jenis
6	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung	1 Gedung
7	Rehabilitasi gedung kantor	Jumlah gedung	1 Gedung
8	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN	16 Orang
9	Fasilitasi penyediaan pakaian dinas dan atribut aparatur	Jumlah stell pakaian	65 Stell
10	Pelaksanaan penyebarluasan informasi dan pelayanan SKPD	Jumlah pameran	2 Pameran
11	Pembangunan dan pemeliharaan Sistem Informasi SKPD	Jumlah aplikasi Sistem Informasi	2 Aplikasi

5.Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

NO	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya perlindungan lembaga ketenagakerjaan untuk harmonisasi hubungan industrial	Cakupan sengketa perusahaan-pekerja yang diselesaikan	25 %

6.Kasi Persyaratan Kerja

NO	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Fasilitasi pelayanan persyaratan kerja	Jumlah orang	800 orang

7.Kasi Hubungan Industrial

NO	Sasaran Strategis kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Fasilitasi penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	Jumlah kasus	9 kasus

8.Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

NO	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4

1	Fasilitasi perlindungan hukum dan jam-sostek	Jumlah peserta BPJS	15.500 orang
---	--	---------------------	--------------

9. Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

NO	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase peserta latih yang berkompeten	60 %
2	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat kesempatan kerja	3,5 %

10.Kasi Pelatihan dan Produktifitas

NO	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Peningkatan produktivitas dan kapasitas instruktur dan tenaga latih LPK	Jumlah Instruktur dan tenaga latih LPK	60 Orang
2	Pengembangan sistem pelatihan dan kulaitas tenaga kerja	- Jumlah dokumen - Jumlah orang	- 1 Dokumen - 70 orang

11. Kasi Penempatan Tenaga Kerja

NO	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Pelayanan penyebarluasan informasi bursa kerja, penempatan tenaga kerja dan penyusunan database tenaga kerja	Jumlah pencari kerja	2500 orang
		Jumlah peserta sosialisasi	375 orang
		Jumlah dokumen	12 dokumen

12.Kasi Perluasan Kesempatan Kerja

NO	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Fasilitasi perluasan kesempatan kerja	Jumlah WUB, TKM dan Purna PMI	120 orang

13.Kabid Perindustrian

NO	Sasaran Strategis Program	Indikator K inerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya teknologi, inovasi dan kreativitas pelaku industri	Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri	40 %
2	Menguatnya struktur industri	Cakupan fasilitasi tahapan pengembangan kawasan peruntukan industri	40 %
3	Meningkatnya kerjasama, promosi dan investasi industri	Persentase IKM unggulan	25 %

14. Kasi Pembangunan Sumber Daya Industri

NO	Sasaran Strategis kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Pelatihan IKM baru	Jumlah pelaku IKM	239 IKM
2	Pengembangan inovasi dan teknologi system produksi	Jumlah pelaku IKM	30 IKM
3	Pengembangan kreativitas dsain kemasan produk industri	Jumlah pelaku IKM	10 IKM

15.Kasi Sarana dan Prasarana Industri

NO	Sasaran Strategis kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana klaster industri	Jumlah klaster industri	2 Klaster industri
2	Pengembangan sistem informasi data dan standarisasi industri	Jumlah IKM (data industri)	3300 IKM

16. Kasi Pemberdayaan Industri

NO	Sasaran Strategis kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Promosi dan lomba produk IKM	Jumlah pameran dan lomba	10 kali

17.Kepala UPT. BLK

NO	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja	500 orang
2	Fasilitasi Pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja (Pendamping Dana Dekonsentrasi)	Jumlah paket	37 Paket

18.Kasubbag Tata Usaha BLK

NO	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Fasilitasi penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah jenis bahan/ peralatan/ perlengkapan	36 Jenis
2	Fasilitasi Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Jumlah orang	152 Orang
3	Fasilitasi penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Jumlah PTT	6 Orang

4	Penambahan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah jenis sarpras	1 Jenis
5	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah jenis sarpras	40 Jenis
6	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung	1 Gedung
7	Rehabilitasi gedung kantor	Jumlah gedung	1 Gedung
8	Fasilitasi penyediaan pakaian dinas dan atribut aparatur	Jumlah stel pakaian	22 Stel
9	Pelaksanaan penyebarluasan informasi dan pelayanan SKPD	Jumlah pameran	1 Pameran

F. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mendukung visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dijabarkan dalam sasaran strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah :

Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi
 - b) Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran
 - c) Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD
- 2) Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
 - c) Pembangunan gedung kantor
 - d) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 - e) Peningkatan kemampuan teknis aparatur
 - f) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 3) Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD
 - a) Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan
 - b) Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi SKPD
- 4) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
 - a) Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD
 - b) Penyusunan laporan keuangan
 - c) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

- 5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - a) Pelatihan Tenaga Kerja Siap Pakai
 - b) Peningkatan Produktivitas kerja dan peningkatan kapasitas lembaga pelatihan kerja
 - c) Pengembangan Sistem Pelatihan Kerja
- 6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - a) Pelayanan ketenagakerjaan, penyusunan database tenaga kerja dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
 - b) Fasilitasi perluasan kesempatan kerja
- 7) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Harmonisasi Hubungan Industrial
 - a) Fasilitasi Pelayanan Persyaratan Tenaga Kerja
 - b) Fasilitasi Pelayanan Sistem Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga kerja
 - c) Fasilitasi dan Pelayanan Kelembagaan serta Penyelesaian Penelitian Hubungan Industrial

UPT. BLK

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi
 - b) Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran
 - c) Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD
- 2) Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
 - c) Pembangunan gedung kantor
 - d) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 - e) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 3) Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD
 - a) Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan
- 4) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - a) Pelatihan Tenaga Kerja Siap Pakai (pendamping dana dekon-sentrasi)

Urusan Pilihan Bidang Perindustrian :

1. Program Pembangunan Sumberdaya Industri
 - a) Pembinaan Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Industri

- b) Pengembangan Sistem Produksi, Inovasi dan Teknologi Industri
 - c) Pengembangan Kreativitas, Desain dan Jasa Industri
- 2. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri
 - a) Penyediaan sarana dan prasarana klaster industri
 - b) Pengembangan Sistem Informasi Data dan Standarisasi Industri
- 3. Program Pemberdayaan Industri Unggulan Daerah
 - a) Peningkatan kerjasama ,Promosi dan investasi Industri

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

Target dan capaian Sasaran RPJMD yang diampu oleh Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)		Indikator Kinerja Utama	Tahun 2019			Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,30	3,41	96,77%	3,00	3,57	84%
2	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	1	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	5 Unit Usaha	10 Unit Usaha	200%	10 Unit Usaha	25 Unit Usaha	250%

A. Penjelasan Tentang Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) merupakan rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.

Penganggur Terbuka (PT) dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mereka yang mencari pekerjaan
2. Mereka yang mempersiapkan usaha
3. Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan
- 4.. Mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Secara umum angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2020 capaiannya adalah 3,57% dibandingkan capaian pada tahun 2019 yaitu 3,38%. Capaian 3,57% ini masih diatas angka target yang diharapkan oleh Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 yaitu 3,00%. Namun di sisi lain, angka TPT kabupaten Tanah Laut masih di bawah angka TPT Provinsi Kal-Sel yaitu 4,74%. Peningkatan angka TPT pada tahun 2020 ini terutama dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19, seperti gambaran berikut :

- a. Faktor Ekonomi, dimana sektor ketenagakerjaan (formal) sangat dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang di ambil beberapa perusahaan karena kondisi mereka yang merugi akibat turunnya demand produk mereka dari luar negeri yaitu :
1. Memberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya;
 2. Merumahkan karyawannya, hingga situasi kondusif yang memungkinkan perusahaan untuk merekrut kembali karyawan tersebut;
 3. Mengurangi jam kerja karyawan;
 4. Menunda perekrutan karyawan baru akibat menurunnya produktivitas dari perusahaan..
- b. Faktor Kemiskinan, hal ini ditandai dengan rendahnya kemampuan daya beli masyarakat diantaranya dipengaruhi oleh :
1. Keputusan seperti pada poin a diatas, dimana sebagian besar perusahaan yang mengambil keputusan tersebut bergerak bergerak di sektor lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan, Pertanian dan Industri. Hal ini selaras dengan penyampaian BPS Provinsi Kal-Sel sebagaimana Rilis Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Ketenagakerjaan, BPS Prov. Kal-Sel disampaikan bahwa Sektor Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan dan Sektor Pertanian dan Industri menyumbang kontraksi ekonomi yang cukup dalam di Provinsi Kal-Sel.
 2. Keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang diberlakukan oleh kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut, dimana memberikan pengaruh kesempatan berusaha untuk masyarakat luas.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,57% pada tahun 2020 menggambarkan masih diperlukannya peran Pemerintah Daerah untuk memperluas kesempatan kerja. Mencermati penyampaian Launching Hasil Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Implikasinya yang dipaparkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada 23 tanggal November 2020, berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui SKPD terkait dan pihak swasta yaitu Lembaga Pendidikan Keterampilan baik yang dimiliki oleh perseorangan maupun perusahaan, dalam menyikapi dunia kerja dan angkatan kerja era transisi/pasca kondisi pandemi berakhir :

- a. Memberikan pendidikan pelatihan dan keterampilan kepada pencari kerja yang sarat dengan penguasaan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi, teknologi industri untuk diversifikasi produk, hingga beragam teknologi yang dibutuhkan oleh masing-masing sektor lapangan usaha. Beberapa sektor yang diduga akan berkembang pasca pandemi adalah Real Estate/perumahan, Informasi dan komunikasi, Listrik dan gas, Jasa perusahaan, Jasa Pendidikan
- b. Ada 10 Jenis pekerjaan yang paling dibutuhkan setelah pandemi berakhir, untuk itu diperlukan pendidikan dan keterampilan yang akan memperluas wawasan pencari kerja serta membekali mereka terjun ke dunia kerja. Adapun 10 jenis pekerjaan tersebut adalah :
 1. Profesional penjualan, pemasaran dan humas
 2. Pekerja penjualan lainnya
 3. Teknisi operasi Teknologi Informasi Komunikasi dan pengguna
 4. Pengemudi mobil van dan sepeda motor
 5. Tenaga perkantoran umum
 6. Operator mesin stasioner lainnya
 7. Buruh pertambangan dan konstruksi
 8. Pekerja instalasi dan peralatan listrik
 9. Profesional administrasi
 10. Pekerja kasar lainnya
- c. Memperluas kesempatan pemagangan dalam negeri atau pemagangan luar negeri bagi pencari kerja serta meningkatkan produktivitas perusahaan
- d. Memperluas kesempatan kerja di desa melalui pelatihan berbasis masyarakat maupun pelatihan berbasis kompetensi yang merupakan perwujudan kesempatan kerja sektor informal bekerja sama dengan SKPD terkait
- e. Memperluas kesempatan kerja untuk penyandang disabilitas
- f. Memperbesar kesempatan pencari kerja/pekerja yang berpengalaman untuk mendapatkan sertifikat keahlian melalui bantuan pelaksanaan uji kompetensi
- g. Meningkatkan pelayanan Informasi pasar kerja daerah dan Bursa Kerja Khusus
- h. Meningkatkan pelayanan pasar kerja luar negeri bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pemberdayaan Purna PMI
- i. Meningkatkan peluang usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

- j. Mengusulkan pembentukan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) yang merupakan dukungan sektor ketenagakerjaan atas ditetapkannya Kawasan Industri Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional.

B. PENJELASAN TENTANG INDUSTRI KREATIF

Industri Kecil Menengah (IKM) adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah. Menurut Peraturan Kementerian Perindustrian No. 64 tahun 2016, industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan, yang dimaksud dengan industri menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 miliar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 miliar rupiah.

Tabel
jumlah IKM yang mengembangkan inovasi dan Kreativitas Industri
di Tahun 2019 dan Tahun 2020

Tahun 2019			Tahun 2020		
No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
1	IKM Langkar Sasirangan	Desa Bajuin, Kec. Bajuin	1	IKM Batu Birah Sasirangan	Desa Batu Tungku, Kec. Panyipatan
2	IKM Kunyit Sasirangan	Desa Kunyit, Kec. Bajuin	2	IKM Bumi Asih Sasirangan	Desa Bumi Asih, Kec. Panyipatan
3	IKM Delima Sasirangan Kintap,	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	3	IKM Rumah Sasirangan Asam - Asam	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong
4	IKM Anyaman Pandan Swarangan	Desa Swarangan, Kec. Jorong	4	IKM Sasirangan Asam-Asam Berkarya	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong
5	IKM Anyaman Purun Telaga Langsung	Desa Telaga Langsung, Kec. Pelaihari	5	IKM Pengolah Daging Bina Keluarga	Desa Sungai Pinang, Kec. Tambang Ulang
6	IKM Kerajinan Kayu Ulin Pelaihari	Pelaihari	6	IKM Pengolah Daging Sekar Kemuning	Desa Sumber Mulya, Kec.

					Pelaihari
7	IKM Kerajinan Kayu Ulin Panyipatan	Desa Kandangan Lama, Kec. Panyipatan	7	IKM Asri Sasirangan	Desa Jorong, Kec. Jorong
8	IKM Kerajinan Kayu Ulin Ds. Telaga	Desa Telaga, Kec. Pelaihari	8	IKM Kulit Insan Leather	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari
9	IKM Sasirangan Jorong	Desa Jorong, Kec. Jorong	9	IKM Karya Mulia <i>Creative</i> Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
10	IKM Tenun Pelaihari	Desa Tebing Siring, Kec. Pelaihari	10	IKM Zidan Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
			11	IKM Amanah Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
			12	IKM Kartar Sasirangan	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari
			13	IKM El Banjarie Eksklusif	Pelaihari
			14	IKM Kerajinan Anyaman Purun "Bunga Purun"	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati
			15	IKM Sahabat Madu	Desa Sumber Makmur, Kec. Takisung
			16	IKM Permata Sejati Madu	Desa Telaga, Kec. Pelaihari
			17	IKM BYHAF Minuman Herbal	Desa Tirta jaya, Kec. Bajuin
			18	IKM Faeyza RNH <i>Collection</i>	Desa Takisung, Kec. Takisung
			19	IKM <i>Cisyl Collection</i>	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
			20	IKM <i>Lenn Made Collec-</i>	Desa Sungai Jelai,

				<i>tion</i>	Kec. Tambang Ulang
			21	IKM NJH Minuman Herbal	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
			22	IKM Minuman Herbal Mama Wulan	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari
			23	IKM Pondok Jahit	Pelaihari
			24	IKM Novie Konveksi	Pelaihari
			25	IKM <i>LuwesCollection</i>	Pelaihari

Pada tahun 2019 dari target pertumbuhan industri yang mengembangkan inovasi dan kreativitas Industri yang dicanangkan yaitu sebanyak 5 IKM, terealisasi sebanyak 10 IKM terdiri dari IKM Langkar Sasirangan, IKM Kunyit Sasirangan, IKM Delima Sasirangan Kintap, IKM Anyaman Pandan Swarangan, IKM Anyaman Purun Telaga Langsung, IKM Kerajinan Kayu Ulin Pelaihari, IKM Kerajinan Kayu Ulin Panyipatan, IKM Kerajinan Kayu Ulin Ds. Telaga, IKM Sasirangan Jorong, IKM Tenun Pelaihari.

Sedangkan pada tahun 2020 dari target pertumbuhan industri jumlah IKM yang mengembangkan inovasi dan Kreativitas Industri yang dicanangkan yaitu sebanyak 10 IKM, terealisasi sebanyak 25 IKM antara lain IKM Batu Birah Sasirangan, IKM Bumi Asih Sasirangan, IKM Rumah Sasirangan Asam - Asam, IKM Sasirangan Asam-Asam Berkarya, IKM Pengolah Daging Bina Keluarga, IKM Pengolah Daging Sekar Kemuning, IKM Asri Sasirangan, IKM Kulit Insan Leather, IKM Karya Mulia *Creative* Sasirangan, IKM Zidan Sasirangan, IKM Amanah Sasirangan, IKM Kartar Sasirangan, IKM El Banjarie Eksklusif, IKM Kerajinan Anyaman Purun “Bunga Purun”, IKM Sahabat Madu, IKM Permata Sejati Madu, IKM BYHAF Minuman Herbal, IKM Faeyza RNH *Collection*, IKM *Cisyl Collection*, IKM *Lenn Made Collection*, IKM NJH Minuman Herbal, IKM Minuman Herbal Mama Wulan, IKM Pondok Jahit, IKM Novie Konveksi dan IKM *Luwes Collection*.

Pertumbuhan IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas Industri ini terjadi dikarenakan adanya pelatihan dan pembinaan intensif dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut baik yang pendanaannya bersumber dari APBD Kab Tanah Laut maupun melalui Dana Dekonsentrasi Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian RI. Di Tahun 2020, se-

menjak pandemi covid-19 melanda di seluruh wilayah Indonesia, dana - dana kegiatan pembinaan IKM yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut mengalami refocusing dalam rangka untuk pencegahan dan penanggulangan covid-19. Oleh karenanya, sinergi kerjasama pembinaan IKM antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan demi eksistensi keberadaan dan keberlangsungan usaha IKM.

Selain dari pelatihan, data Industri yang mengembangkan inovasi dan kreativitas juga didapatkan dari Kegiatan Pendataan IKM se Kabupaten tanah Laut yang dilakukan rutin setiap tahun. Adapun Tahun 2020 ada 3378 IKM yang berhasil didata.

Tabel
Rekap data IKM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020

N o	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah IKM
1	Kintap	Muara Kintap	25
		Sumber Jaya	11
		Sebamban Baru	19
		Mekar Sari	25
		Kebun Raya	44
		Sungai Cuka	18
		Bukit Mulya	15
		Salaman	5
		Pandan Sari	18
		Kintap Kecil	26
		Riam Adungan	4
		Pasir Putih	9
		Kintap	12
		Kintapura	21
		TOTAL	252
2	Bati-Bati	Banua Raya	17
		Bati-Bati	46
		Padang	30
		Ujung	27
		Pandahan	37
		Nusa Indah	18
		Lianganggang	55
		Kait-Kait	28
		Ujung Baru	36
		Kait-Kait Baru	31
		Sambangan	23
		Bentok Kampung	24
		Bentok Darat	28
		Banyu Irang	30
		TOTAL	430
3	Tambang Ulang	Martadah	9

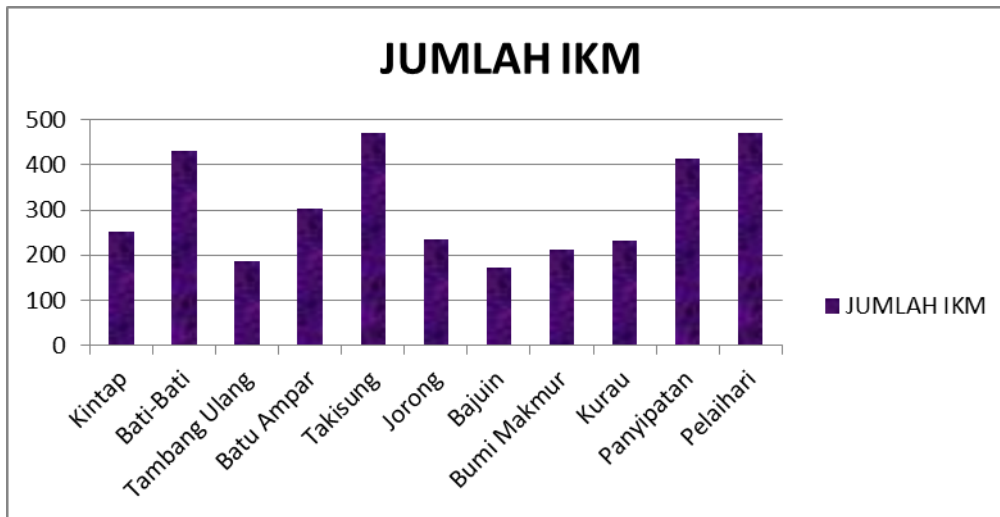
		Martadah Baru	24
		Tambang Ulang	29
		Bingkulu	13
		Kayu Abang	13
		Gunung Raja	35
		Pulau Sari	27
		Sungai Pinang	16
		Sungai Jelai	21
		TOTAL	187
4	Batu Ampar	Tajau Mulya	10
		Gunung Mas	25
		Gunung Melati	20
		Tajau Pecah	33
		Jilatan Alur	16
		Jilatan	13
		Batu Ampar	20
		Ambawang	17
		Damit Hulu	15
		Damar Lima	16
		Damit	29
		D. Bungkok	49
		Bluru	22
		Pantai Linuh	18
		TOTAL	303
5	Takisung	Gunung Makmur	45
		Benua Tengah	35
		Sumber Makmur	39
		Pagatan Besar	65
		Takisung	66
		Tabanio	25
		Telaga Langsung	25
		Benua Lawas	26
		Ranggang	24
		Ranggang Dalam	12
		Batilai	27
		K. Tambangan	83
		TOTAL	472
6	Jorong	Alur	19
		Karang Rejo	25
		Swarangan	22
		Batalang	3
		Sabuhur	20
		Asam Jaya	27
		Asri Mulya	15
		Jorong	50
		Muara Asam-Asam	19
		Asam-Asam	15
		Simpang 4 Sei Baru	20
		TOTAL	235
7	Bajuin	Tanjung	46
		Bajuin	12
		Sungai Bakar	9

		Kunyit	24
		Ketapang	19
		Pemalongan	13
		Tebing Siring	18
		Tirta Jaya	14
		Galam	16
		TOTAL	171
8	Bumi Makmur	Bumi Harapan	9
		H. BI. Atas	15
		H. BI. Bawah	4
		Handil Babirik	15
		Handil Gayam	13
		Kurau Utara	52
		Handil Suruk	11
		Pantai Harapan	15
		Sungai Rasau	60
		Handil Maluka	7
		H. Labuan Amas	12
		TOTAL	213
9	Kurau	Raden	9
		Bawah Layung	11
		Tambak Karya	19
		Tambak Sarinah	14
		Maluka Baulin	10
		Sarikandi	17
		Kurau	21
		Handil Negara	72
		Kali Besar	30
		Padang Luas	15
		Sungai Bakau	13
		TOTAL	231
10	Panyipatan	Batakan	92
		Batu Tungku	31
		Kandangan Lama	33
		Kuringkit	48
		Batu Mulya	37
		Panyipatan	36
		Bumi Asih	20
		Sukaramah	38
		Kandangan Baru	51
		Tanjung Dewa	27
		TOTAL	413
11	Pelaihari	Telaga	28
		Ambungan	29
		Panggung	11
		Pemuda	37
		Guntung Besar	12
		Kampung Baru	26
		Sungai Riam	38
		Sumber Mulia	25
		Atu-Atu	11
		Bumi Jaya	48

		Tampang	19
		Panjaratan	17
		Sarang Halang	18
		Pabahanan	21
		Karang Taruna	48
		Angsau	13
		Ujung Batu	18
		Tungkaran	7
		Panggung Baru	23
		Pelaihari	22
		TOTAL	471
	Jumlah Data IKM		3378

Gambar

Jumlah IKM Tahun 2020 di Kab. Tanah Laut



A. Adapun Kendala-kendala yang dihadapi antara lain adalah :

1. Adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada aspek pemasaran.

Adanya Covid-19 sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Masyarakat lebih mengutamakan untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Dengan adanya pandemi ini pula, even-even promosi dan pameran yang biasanya rutin dilaksanakan oleh kabupaten/provinsi dan pusat, saat ini ditiadakan, sehingga tingkat penjualan produk IKM yang biasanya naik ketika ada even kegiatan, maka ketika even tersebut ditiadakan maka penjualan produk menjadi tidak sebesar tahun sebelumnya. Demikian juga obyek wisata yang menjadi tempat penjualan produk, dengan adanya pandemi obyek wisata tersebut mengalami penurunan pengunjung sehingga tingkat penjualan produk IKM pun menjadi menurun.

2. Mesin dan Peralatan

Beberapa IKM terkendala belum adanya mesin/peralatan produksi yang memadai, seperti yang dialami oleh pengrajin pembuat cobek kayu ulin, mereka belum memiliki mesin bubut dan mesin pendukung lainnya sehingga proses produksi memerlukan waktu yang lama. Masalah peralatan yang kurang memadai juga dirasakan oleh beberapa pengrajin lain, diantaranya pengrajin minuman herbal, pengrajin VCO, pengrajin olahan daging sapi, pengrajin penyamakan dan olahan kulit sapi, juga pengrajin lainnya baik dari IKM pangan maupun kerajinan.

3. Minat Pelaku Usaha

Dibeberapa IKM sudah berjalan baik, namun yang menjadi kendala, ada beberapa kelompok dimana hanya sebagian anggota kelompok yang mengembangkan usaha tersebut sehingga kelompok tersebut tidak berkembang sesuai yang direncanakan. Hal ini bisa terjadi karena sebagian masyarakat merasa pendapatan dari sektor IKM belum mampu meningkatkan tingkat perekonomian mereka selain itu tersebut, mereka merasa penghasilan yang didapat di industri kerajinan ini tidak pasti, sehingga mereka memilih untuk berusaha di sektor lain, misal menjadi penyadap karet maupun pekerjaan lainnya yang hasilnya langsung bisa rasakan. Kendala lain adalah kurangnya minat masyarakat karena mereka tidak menguasai proses produksi dengan baik serta kurangnya jiwa entrepreneur, sehingga ketika hasil produk masih kurang baik, maka mereka menjadi down dan berhenti berusaha.

B. Solusi

Solusi untuk memecahkan masalah tersebut antara lain :

1. Harapan kami, even-even promosi dan pameran serta obyek wisata tetap diselenggarakan dan dibuka dengan mematuhi protokol kesehatan. Sehingga hal ini dapat meningkatkan kembali penjualan produk IKM.
2. Kami akan mendorong IKM untuk dapat mengakses Program gapura Karomah dikarenakan IKM - IKM yang baru bertumbuh juga memerlukan stimulus bantuan permodalan yang dalam hal ini dapat ditanggulangi melalui Program Gapura Karomah yaitu program Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa

Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah yang berlangsung sejak tahun 2019 dan berlanjut hingga sekarang. Pada Tahun 2019 ada 6 orang IKM yang mengajukan permohonan dan di Tahun 2020 ada 11 IKM yang mengajukan usulan pada Program Gapura Karomah. Selain dari Program Gapura Karomah, usulan peralatan dan mesin dari kelompok IKM melalui proposal maupun melalui kegiatan Musrembang juga akan kami anggarkan di Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut.

3. Diperlukan pelatihan-pelatihan pembangunan jiwa enterpreur dan juga pelatihan kewirausahaan dengan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan juga dengan Bidang P2TK Disnakerind. Selain hal tersebut, pemilihan peserta pelatihan oleh Kepala Desa diharapkan juga akan lebih selektif lagi agar benar-benar yang berminat yang akan diikutsertakan dalam pelatihan.

C. Rencana Aksi

1. Tahun depan kami akan mengusulkan Mobil Toko sebagai salah satu alternatif promosi produk IKM. Dengan adanya Mobil Toko, maka promosi akan lebih mudah dilakukan yaitu dengan cara membersamai ketika ada kegiatan di desa semisal Kegiatan anunggal Tuntung Pandang. Selain itu juga ketika ada kegiatan-kegiatan daerah lainnya.

Selain itu, kami akan lebih giat mempromosikan Gedung Dekranasda dan Gedung Pusat Promosi Sentra IKM Tambang Ulang sebagai tempat promosi produk IKM, baik pangan maupun kerajinan. Selama ini promosi dilakukan melalui Media Sosial *Facebook* dengan alamat Fb : ***Dekranasda Tanah Laut dan Puspro Tambang Ulang***), melalui *Instagram* dan melalui Aplikasi *Whats App*. Promosi yang akan dilakukan ditahun depan dengan cara membuat Aplikasi *E-commerce* yaitu berupa penjualan produk IKM secara online. Selain itu, kami akan bekerjasama dengan Radio Tuntung Pandang dan juga membuat brosur mengenai kedua tempat promosi tersebut.

2. Akan berkoordinasi dengan BT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengenai Program Gapura Karomah serta akan terus mensosialisasikan program ini ke masyarakat dan ketika ada pelatihan-pelatihan. Selain hal tersebut, kami juga mendorong IKM untuk mengusulkan mesin dan peralatan yang diperlukan melalui proposal dan melalui Kegiatan Musrembang.

Akan berkoordinasi dengan pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan SKPD terkait, juga akan membangun komunikasi dengan asosiasi maupun lembaga terkait lainnya untuk bersama-sama mendorong masyarakat untuk menumbuhkan jiwa enterpreneur melalui sosialisasi maupun pelatihan teknis lainnya.

2. Eselon II (Kepala Dinas)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1 Tingkat partisipasi angkatan kerja	69.68%	70.3%	72,03%	102,46%	71.9%	100,18%
2.	Meningkatnya pelayanan penempatan kerja	1 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	5.13%	5.5%	7,13%	129,66%	6.5%	109,7%
3.	Hubungan industrial harmonis dan kondusif	1 Persentasi penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	2.28%	25%	19%	76%	10%	19,46%
4.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri	1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	12.85%	14.17%	12.49%	88%	16.35%	76.39%
5.	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	1 Nilai Sakip Disnakerin	B	BB	BB	100%	A	90%

3. Eselon III (Sekretaris)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan	1 Nilai komponen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja pada LHE SAKIP SKPD	B	BB	BB	100%	A	90%
2.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	-	-	Sangat Baik	100%
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana serta sumber daya aparatur	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	-	-	Sangat Baik	25.70%
4.	Pemenuhan informasi pembangunan dan pelayanan SKPD	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	-	-	Sangat Baik	

1) Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Fasilitasi penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	1 Jumlah jenis bahan/ peralatan/ perlengkapan	-	35 Jenis	35 Jenis	100%	35 Jenis	100%
2.	Fasilitasi Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	1 Jumlah orang	-	1700 Orang	741 orang	44%	7400 Orang	100%
3.	Fasilitasi penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	1 Jumlah PTT	16 Orang	18 Orang	18 Orang	100%	22 orang	82%
4.	Penambahan sarana dan prasarana perkantoran	1 Jumlah jenis sarpras	-	4 Jenis	4 Jenis	100%	7 Jenis	57%
5.	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	1 Jumlah jenis sarpras	-	16 Jenis	15 Jenis	95%	16 Jenis	95%
6.	Pembangunan gedung kantor	1 Jumlah gedung	-	1 Gedung	Dokumen Perencanaan	50%	4 Gedung	12,5%
7.	Rehabilitasi gedung kantor	1 Jumlah gedung	-	1 Gedung	1 Gedung	100%	4 Gedung	25%
8.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 Jumlah ASN	4 Orang	16 Orang	16 Orang	100%	36 Orang	44%
9.	Fasilitasi penyediaan pakaian dinas dan atribut aparatur	1 Jumlah stell pakaian	-	65 Stell	-	-	266 Stell	0%
10.	Pelaksanaan penyebaran informasi dan pelayanan SKPD	1 Jumlah pameran	1 pameran	2 Pameran	-	-	8 Pameran	13%
11.	Pembangunan dan pemeliharaan Sistem Informasi SKPD	1 Jumlah aplikasi Sistem Informasi	4 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%	8 Aplikasi	25%

2) Eselon IV (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Pemenuhan pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan yang akuntabel	1 Jumlah dokumen dan laporan keuangan	18 laporan	2 Dokumen dan 3 Jenis Laporan	2 Dokumen dan 3 jenis laporan	100%	2 Dokumen dan 3 Jenis Laporan	40%
2.	Pemenuhan perencanaan kerja tahunan sesuai ketentuan yang berlaku	2 Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	100%	3 Dokumen	40%
3.	Sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja yang terukur dan akuntabel	Jumlah dokumen dan laporan kinerja	3 Dokumen	3 Dokumen dan 3 Jenis Laporan	3 dok, 3 jenis laporan	100%	3 Dokumen dan 3 Jenis Laporan	40%

3) Eselon IV (Kepala Subbag Tata Usaha BLK)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Fasilitasi penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	1 Jumlah jenis bahan/ peralatan/ perlengkapan	-	36 Jenis	svdfg	64%	38 Jenis	61%
2.	Fasilitasi Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	1 Jumlah orang	-	152 Orang	91 Orang	59,87%	610 orang	40
3.	Fasilitasi penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	1 Jumlah PTT	6 Orang	6 Orang	6 Orang	100%	6 Orang	100%
4.	Penambahan sarana dan prasarana perkantoran	1 Jumlah jenis sarpras	-	1 Jenis	1 Jenis	100%	6 Jenis	17%
5.	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	1 Jumlah jenis sarpras	-	40 Jenis	24 Jenis	60%	40 Jenis	60%
6.	Pembangunan gedung kantor	1 Jumlah gedung	-	1 Gedung	1 Gedung	100%	4 Gedung	25%
7.	Rehabilitasi gedung kantor	1 Jumlah gedung	-	1 Gedung	-	-	4 Gedung	0%
8.	Fasilitasi penyediaan pakaian dinas dan atribut aparat	1 Jumlah stell pakaian	-	22 Stell	-	-	44 Stell	0%
9.	Pelaksanaan penyebaran informasi dan pelayanan SKPD	1 Jumlah pameran	-	1 Pameran	-	-	5 Pameran	0%

4. Eselon III (Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Meningkatnya kompetensi tenaga	1 Persentase peserta latih yang berkompeten	40.75%	60%	0.00%	0.00%	75.0%	75.0%
2	Meningkatnya kesempatan kerja	1 Tingkat kesempatan kerja	6.52%	3.5%	96,43%	2755.16%	6.5%	6.5%

1) Eselon IV (Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Pelayanan penyebarluasan informasi bursa kerja, penempatan tenaga kerja dan penyusunan database tenaga kerja	1 Jumlah pencari kerja	1733 orang	2500 orang	2496 orang	99,84%	10.000 orang 12 dokumen	25.9% 100%
		1 Jumlah peserta sosialisasi	50 orang	375 orang	95 orang	25%		
		1 Jumlah dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100.00%		

2) Eselon IV (Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Peningkatan produktivitas dan kapasitas instruktur dan tenaga latih LPK	1 Jumlah instruktur dan tenaga latih LPK	60 orang	20 orang	15 orang	75%	330 orang	24%
2	Pengembangan sistem pelatihan dan kualitas tenaga kerja	1 Jumlah dokumen	1 dokumen	0 dokumen	-	-	4 dokumen	-
		1 Jumlah orang	17 Orang	10 orang	10 orang	100.0%	310 orang	5,48%

3) Eselon IV (Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Fasilitasi perluasan kesempatan kerja	1 Jumlah WUB, TKM dan Purna PMI	120 orang	120 orang	18 orang	15.00%	680 orang	100.00%

4) Eselon IV (Kepala UPT. BLK)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja	1 Jumlah pencari kerja	1.248 Orang	500 orang	879 orang	175.80%	2.500 orang	85.1%
2.	Fasilitasi Pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja (Pendamping Dana Dekonsentrasi)	1 Jumlah paket	79 paket	37 paket	18 Paket	49%	-	100.0%

5. Eselon III (Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsotek)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Meningkatnya perlindungan lembaga ketenagakerjaan untuk harmonisasi hubungan industrial	1 Cakupan sengketa perusahaan-pekerja yang diselesaikan	44.0%	25.0%	100.0%	400.0%	35%	8880.00%

1) Eselon IV (Kepala Seksi Persyaratan Kerja)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Tercapainya pelaku hubungan industrial yang menaati peraturan ketenagakerjaan	1 Jumlah orang	1941 orang	800 orang	1918 orang	221%	3200 Orang	60%

2) Eselon IV (Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsostek)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Fasilitasi perlindungan hukum dan jamsostek	1 Jumlah peserta BPJS	20.670 orang	15.500 orang	21.084 orang	136%	17.000 orang	246%

3) Eselon IV (Kepala Seksi Hubungan Industrial)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Fasilitasi penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	1 Jumlah kasus yang terfasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	11 kasus	9 kasus	9 kasus	100%	48 kasus	41,67%

6. Eselon III (Kepala Bidang Perindustrian)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Meningkatnya teknologi, inovasi dan kreativitas pelaku industri	1. Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri	-	40%	23%	58%	100%	23.4300%
2.	Menguatnya struktur industri	1. Cakupan fasilitasi tahapan pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri	2%	40%	17%	42%	65%	25.65%
3.	Meningkatnya kerjasama, promosi dan investasi industri	1. Persentase IKM unggulan	-	25%	11,57%	46,3%	100%	63%

1) Eselon IV (Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Pelatihan IKM baru	1. Jumlah pelaku IKM	140 IKM	135 IKM	135 IKM	100%	1580 IKM	9%
2.	Pengembangan inovasi dan teknologi sistem produksi	1. Jumlah pelaku IKM	-	30 IKM	30 IKM	100%	150 IKM	20%
3.	Pengembangan kreativitas desain kemasan produk industri	1. Jumlah pelaku IKM	-	0 IKM	0 IKM	-	70 IKM	0%

2) Eselon IV (Kepala Seksi Sarana Prasarana Industri)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana klaster industri	1. Jumlah klaster industri	2 kl	2 kl	2 kl	100%	17 KI	12%
2.	Pengembangan sistem informasi data dan standarisasi industri	2. Jumlah IKM (data industri)	-	3300 IKM	3378 IKM	102%	13.500 IKM	25%

3) Eselon IV (Kepala Seksi Pemberdayaan Industri)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Promosi dan lomba produk IKM	1 Jumlah pameran dan lomba	13 kali	2 kali	4 kali	200%	32 kali	13%

Dalam rangka memperoleh informasi kinerja yang penting dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dapat dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara membandingkan antara nilai target terhadap realisasi, apabila target terpenuhi maka dikategorikan tercapai, dan begitu juga sebaliknya apabila nilai target tidak tercapai maka dikategorikan tidak terpenuhi.

1. Target dan Capaian IKU

Target dan Capaian IKU dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	70,3 %	72,03 %
2	Meningkatnya pelayanan penempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	5,5 %	7,13 %
3	Hubungan industrial harmonis dan kondusif	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	25 %	19 %
4	Meningkatnya kontribusi sektor industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	14,17 %	12,49 %

Uraian dan Analisa Capaian IKU

a. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja

Pada Tahun 2020 daya saing tenaga kerja daerah dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 72,03%, meningkat dari tahun 2019 sebesar 66,85%.

Meningkatnya pelayanan penempatan kerja

Peningkatan pelayanan penempatan kerja pada tahun 2020 sebesar 7,29% dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan 182 orang dari 2496 pencari Kerja yang terdaftar, cukup meningkat signifikan dari capaian tahun 2019 yang hanya 0,78%.

- b. Hubungan Industrial Harmonis dan Kondusif ditandai dengan persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial sebesar 19 %, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 7,6 %.
- c. Kontribusi Sektor Industri mengalami penurunan ditandai dengan Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 12,49 %, yang menurun dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 12,85% hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang Tahun 2020.

Capaian Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dikelompokkan menurut urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dan ditindaklanjuti dengan renstra SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja** ” ditetapkan sasaran “Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja”.
2. Untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan Pelayanan Penempatan Kerja**” ditetapkan sasaran “Meningkatnya Pelayanan Penempatan Kerja”.
3. Untuk mencapai tujuan **Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial** ditetapkan sasaran “Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial “
4. Untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan Kinerja Sektor Industri.**” ditetapkan sasaran “Meningkatnya Kinerja Sektor Industri”.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disnakerind dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69.90%	70.30%	71%	71.12%	71.90%
2	Meningkatkan Pelayanan Penempatan Kerja	Meningkatnya Pelayanan Penempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	5.20%	5.50%	6%	6.20%	6.50%
3	Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	30%	25%	20%	15%	10%
4	Meningkatkan Kinerja Sektor Industri	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	13.50%	13.65%	14.17%	14.87%	15.57%

Uraian dan Analisa Capaian Sasaran Strategis

Capaian Sasaran organisasi diukur berdasarkan capaian SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD, adapun capaian sasaran organisasi mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan sehingga dalam penyusunan jelas, spesifik dan terukur (measurable) dan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Komitmen dan dukungan pimpinan dan stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen dalam menentukan sasaran dan tujuan, merupakan modal untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Berikut uraian dan analisa sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tahun 2019.

i. Sasaran 1 (Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja)

Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Kinerja Utama Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja ditandai dengan Indikator “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)”.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020 ini mencapai 72,03% atau naik 5,18% dari tahun 2019 sebesar 66,85%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	ANGKATAN KERJA (orang)	172.161	181.827
2.	BEKERJA (orang)	166.334	175.337
3.	PENGANGGURAN (orang)	5.827	6.490
4.	TPAK (%)	66,85	72,03
5.	TPT (%)	3,38	3,57

Pada tahun 2020 Kabupaten Tanah Laut turut terdampak pandemi Covid-19, sehingga salah satu dampaknya adalah pelambatan perekonomian. Akan tetapi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan sebesar 5,18%, TPAK menunjuk kepada persentase jumlah angkatan kerja yang mempunyai pekerjaan (*employment rate*).

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan mengusung Program Unggulan Bupati Tanah Laut yaitu 500 orang siap kerja per tahun berhasil meningkatkan kompetensi 288 orang pencari kerja dari 18 paket pelatihan yaitu Juru las SMAW 3G, Service Sepeda Motor Konvensional, Service Sepeda Motor Injeksi, Pemasangan Instalasi Otomasi Listrik Industry, Instalasi Penerangan, Finishing Teknik Semprot, Juru Gambar, Menjahit Pakaian Sesuai Style, Pengolahan Hasil Perikanan, Perawatan Ac Split, Operator Basic Office, Desain Grafis, Video Editing, Pembuatan Roti dan Kue, Tata Rias Kecantikan Rambut yang dilaksanakan oleh BLK Kabupaten Tanah Laut.

Selain itu BLK Komunitas Ubudiyah Bati-Bati dan BLK Komunitas Darussalim juga berhasil meningkatkan kompetensi 64 orang pencari kerja dari 4 paket pelatihan dengan Kejuruan Komputer, sedangkan BBPLK Serang sebanyak 16 orang

pencari kerja dengan 2 paket pelatihan yaitu kejuruan Las & Listrik, BBPLK Bekasi sebanyak 8 orang pencari kerja dengan 1 paket pelatihan yaitu kejuruan Las, dan 15 LPK Swasta dengan peserta yang lulus sebanyak 345 orang pencari kerja.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian juga telah melaksanakan kegiatan Pemagangan (Pelatihan Berbasis Kompetensi/ On The Job Training) bagi 90 pencari kerja yang terdiri dari Pemagangan Dalam Negeri bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 80 orang, dan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut sebanyak 10 orang. Pada kegiatan ini peserta yang dimagangkan di perusahaan mendapatkan keterampilan dan dilatih serta mendapatkan bimbingan oleh instruktur dari perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan jabatannya. Peserta magang yang lulus dan kompeten nantinya akan direkrut dan ditempatkan di perusahaan yang diikuti.

Beberapa hal yang perlu dicermati dalam memaknai presentase TPAK yang tinggi yaitu :

1. Pendidikan.

Implementasi dari program pendidikan dasar 9 tahun serta semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas angkatan kerja secara umum.

2. Usia.

Berdasarkan usia, maka TPAK untuk kelompok usia 15-19 tahun perlu diperhatikan supaya tetap rendah karena kelompok usia ini termasuk usia sekolah dan kategori anak.

3. Jenis kelamin.

Umumnya laki-laki lebih banyak terjun ke dunia kerja dibandingkan perempuan, dimana perempuan lebih mempertimbangkan pilihan sebagai ibu rumah tangga dibanding sebagai wanita karir.

Untuk mendukung capaian sasaran diatas dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yang disajikan dengan ulasan singkat sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja (APBD), dengan didukung kegiatan :
 - a. Pelatihan Tenaga Kerja Siap Pakai
Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (pelatihan tenaga kerja siap pakai) dengan capaian pelaksanaan 6 paket kegiatan pelatihan ke desa-desa dari jumlah dana Rp.104.853.100,- dengan realisasi keuangan Rp.91.461.800,- atau 87,23%.
 - b. Peningkatan Produktivitas Kerja dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja dengan capaian 15 orang pengelola lembaga pelatihan kerja dalam manajemen dan peningkatan mutu kelembagaan dari jumlah dana sebesar Rp. 29.152.560,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.260.400,- atau 45,49%.
 - c. Pengembangan Sistem Pelatihan Kerja dengan hasil capaian berupa 10 orang peserta pemagangan dalam negeri berbasis pengguna dari jumlah dana Rp. 96.250.740,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 71.235.700,- atau 74,01%.
2. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (APBN), dengan kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja dengan capaian 18 paket pelatihan berbasis kompetensi dengan alokasi dana APBN sebesar Rp. 2.200.630.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.060.278.050,- atau 93.62%

Pada masing – masing kegiatan memiliki fokus keluaran dan hasil yang berbeda – beda, dapat tergambar pada tabel di bawah ini :

No.	Nama Kegiatan	Keluaran	Hasil	Jumlah Pagu
1.	Pelatihan Tenaga Kerja Siap Pakai	Jumlah tenaga kerja	500 orang	Rp. 239.975.250
2.	Peningkatan Produktivitas Kerja dan Peningkatan Kapasitas Lembaga	Jumlah orang	20 orang	Rp. 29.152.560

3.	Pelatihan Kerja Pengembangan Sistem Pelati- han Kerja	Jumlah orang Jumlah Dokumen	10 orang 1 dokumen	Rp. 96.250.740
No.	Nama Kegiatan	Keluaran	Hasil	Jumlah Pagu
4.	Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja	Jumlah orang	288 orang	Rp. 2.200.630.000
Total				Rp. 130.827.410

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2020 untuk mendukung capaian di atas dilaksanakan Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan capaian meningkatnya kompetensi tenaga kerja sebesar 66,19% dari target 60% yang didukung dari dana APBD sebesar Rp. 230.256.400 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 175.957.900,- atau 76,42% dan melalui dana APBN sebesar Rp. 2.200.630.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.060.278.050,- atau 93,62%.

Sebagaimana yang dapat disimak pada tabel dibawah ini :

NO.	KEGIATAN	OUTPUT DALAM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI			
					FISIK	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelatihan Tenaga Kerja Siap Pakai	Jumlah tenaga kerja	500 orang	239.975.250	64 orang	12,8	76.989.350	32,08
2.	Peningkatan Produktivitas Kerja dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah orang	20 orang	29.152.560	15 orang	75	13.260.400	45,49
3.	Pengembangan Sistem Pelatihan Kerja	Jumlah orang Jumlah Dokumen	10 orang 1 dokumen	96.250.740	10 orang	100	71.235.700	74,01
4.	Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja	Jumlah orang	288 orang	2.200.630.000	288 orang	98,25	2.060.278.050	93,62

C. Sumber Daya Manusia

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja tahun 2020 memiliki tim kerja yang cukup minim dimana hanya ada 21 (dua puluh satu) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dibantu tenaga honorer sebanyak 9 (sembilan) orang, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Pembina (IV/a) 1 orang
2. Kepala Seksi
 - ❖ Pelatihan dan Produktivitas Pembina (IV/a) 1 Orang
 - ❖ Penempatan Tenaga Kerja Penata Muda TK I (III/b) 1 orang
 - ❖ Perluasan Kerja Penata Muda TK I (III/b) 1 orang

3. Kepala UPT	Penata TK I (III/d)	1 orang
4. Kasubag TU UPT	Penata (III/c)	1 orang
5. Instruktur		
❖ Instruktur Pelaksana Lanjutan	Penata Muda TK I (III/b)	4 orang
❖ Instruktur Muda	Penata TK I (III/d)	3 orang
❖ Instruktur Pertama	Penata Muda TK I (III/b)	1 orang
❖ Instruktur Penyelia	Penata Muda TK I (III/b)	1 orang
6. Analis bahan penempatan tenaga kerja	Penata TK I (III/d)	1 orang
7. Pengadministrasi Keuangan	Pengatur (II/d)	1 orang
8. Pengadministrasi umum	Penata Muda TK (III/b)	1 orang
9. Pengadministrasi umum	Pengatur (II/d)	1 orang
10. Pengelola informasi pasar kerja online	PTT/ tenaga honorer	2 org
11. Tenaga Pendamping Pelatihan dan Produktivitas	PTT/ tenaga honorer	2 org
12. Pengadministrasi umum	Juru (I/c)	1 orang
13. Pengelola Kios 3 in 1	PTT/ tenaga honorer	2 org
14. Petugas Kebersihan	PTT/ tenaga honorer	2 org
15. Penjaga Malam	PTT/ tenaga honorer	1 orang
16. Administrasi Kantor	PTT/ tenaga honorer	1 orang

D. Analisis Kendala

Pada tahun 2020 Kabupaten Tanah Laut turut terdampak pandemi Covid-19, sehingga salah satu dampaknya adalah pelambatan perekonomian. Beberapa hal yang perlu dicermati dalam memaknai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tinggi karena dipengaruhi oleh factor sebagai berikut :

- ❖ Demografi yaitu pertambahan jumlah penduduk.
- ❖ Perubahan cuaca yang mempengaruhi hasil panen petani.
- ❖ Jumlah lulusan sekolah cukup tinggi sehingga pencari Kerja cukup banyak akan tetapi lapangan pekerjaan baik dari informal dan formal belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga Kerja.
- ❖ Kebijakan perusahaan dalam menyikapi pandemi Covid-19 dimana menurunnya sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian, serta sektor lapangan usaha pertanian dan industri, dengan tujuan supaya perusahaan tidak gulung tikar diantaranya dengan merumahkan karyawan, mengu-

rangi jam kerja karyawan, menunda perekrutan karyawan baru serta memberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

- ❖ Kebijakan perusahaan dalam menyikapi pandemi Covid-19 dimana menurunnya sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian, serta sektor lapangan usaha pertanian dan industri, dengan tujuan supaya perusahaan tidak gulung tikar diantaranya dengan merumahkan karyawan, mengurangi jam kerja karyawan, menunda perekrutan karyawan baru serta memberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

E. Saran dan Solusi

Menanggapi kendala di atas, maka perlu dilakukan :

1. Pemagangan yang di biyai oleh pemerintah pusat, propinsi maupun daerah.
2. Mendorong pemagangan mandiri yang dilakukan oleh perusahaan .
3. Pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat maupun kewirausahaan kepada pencari kerja.
4. Meningkatkan produktivitas LPK untuk melatih pencari kerja.
5. Meningkatkan kerjasama kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendapatkan paket-paket kegiatan dengan sumber dana APBN yang tujuan nya untuk mempersiapkan pencari kerja terjun ke lapangan kerja.
6. Meningkatkan kerjasama kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalsel untuk mendapatkan paket-paket kegiatan dengan sumber dana APBD propinsi yang tujuan nya untuk mempersiapkan pencari kerja terjun ke lapangan kerja.

F. Rencana Aksi Tahun 2021

Pada Tahun 2021 akan dilaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

1. Mengirimkan peserta pelatihan ke-5 Balai Besar di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.
2. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat di desa baik melalui kegiatan Manunggal Tuntung Pandang maupun BLK komunitas.
3. Melaksanakan pemagangan dalam negeri yaitu pemagangan di perusahaan baik melalui dana APBN maupun APBD.
4. Mendukung BLK Komunitas untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

ii. Sasaran 2 (Meningkatnya Pelayanan Penempatan Kerja)

Salah satu Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah meningkatkan pelayanan penempatan kerja. Pada tahun 2020 meningkatnya pelayanan penempatan kerja dimana jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dari 89 orang pada tahun 2019 menjadi 182 orang pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 7.29%. Peningkatan kesempatan kerja di lihat dari persentase sebesar 96,43% dari target 3,5%, dan di lihat dari keuangan dengan jumlah dana sebesar Rp. 130.827.410,- te-realisasi sebesar Rp. 92.889.480,- atau 71,00 %.

Untuk mendukung capaian sasaran ini dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yang disajikan dengan ulasan singkat sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan :

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja tahun 2020 telah menyelesaikan kegiatan – kegiatan berkenaan dengan kinerja dibidang ketenagakerjaan melalui Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan di dukung melalui 2 (dua) kegiatan di Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Seksi Perluasan Kesempatan Kerja yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Ketenagakerjaan, Penyusunan Database Tenaga Kerja, dan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja dilaksanakan 7 paket pelayanan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pelayanan pencatatan pencari kerja sebanyak 2.496 orang (1 Paket);
 - b. Penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada 45 orang pencari kerja dalam rangka memasuki dunia kerja. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui bakat, minat, keahlian, keterampilan, disamping mengetahui tentang dunia Kerja dan karakteristik jabatan yang sesuai bagi dirinya (3 Paket);
 - c. Sosialisasi Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada 30 orang Aparat Desa dan Kecamatan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (2 Paket)
 - d. Sosialisasi tentang Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Perusahaan menuju Kabupaten Tanah Laut sebagai Kawasan Industri Jorong sebanyak 20 orang (1 Paket);

2. Kegiatan Fasilitasi Perluasan Kesempatan kerja dengan capaian Pelatihan Berbasis Kewirausahaan (Entrepreneur) sebanyak 18 orang, selain itu penumbuhan wirausaha baru dilaksanakan melalui Pendampingan Kewirausahaan oleh Tim Mitra Tala Prenuer pada Manunggal Tuntung Pandang.

Pada masing – masing kegiatan memiliki fokus keluaran dan hasil yang berbeda – beda, dapat tergambar pada tabel di bawah ini :

No.	Nama Kegiatan	Keluaran	Hasil	Jumlah Pagu
1.	Pelayanan Ketenagakerjaan, Penyusunan Database Tenaga Kerja, dan Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah pencari kerja ➤ Jumlah peserta sosialisasi ➤ Jumlah Dokumen 	Meningkatnya peluang kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja.	Rp. 81.633.450
2.	Fasilitasi Perluasan Kesempatan kerja	Jumlah WUB, TKM dan Purna PMI	Terciptanya peningkatan wira usaha baru	Rp. 49.193.960
Total				Rp. 130.827.410

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2020 Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja merealisasikan anggaran sebesar Rp. **92.890.280,-** atau 71 % yang mana pada kegiatan fisiknya telah dilaksanakan dengan capaian sebesar 228,75%. Sebagaimana yang dapat disimak pada tabel dibawah ini :

NO.	KEGIATAN	OUTPUT DALAM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI			
					FISIK	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Ketenagakerjaan, Penyusunan Database Tenaga Kerja, dan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Meningkatnya peluang kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja.	2.500 Orang 375 orang 12 dokumen	81.633.450	2.496 orang 95 orang 12 dokumen	100 25, 33 100	62.253.080	76,26
2	Fasilitasi Perluasan Kesempatan kerja	Terciptanya peningkatan wira usaha baru.	120 Orang	49.193.960	18 orang	15	30.637.200	62,28

C. Sumber Daya Manusia

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja tahun 2020 memiliki tim kerja yang cukup minim dimana hanya ada 21 (dua puluh satu) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dibantu tenaga honorer sebanyak 9 (sembilan) orang, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Pembina (IV/a) 1 orang
2. Kepala Seksi
 - ❖ Pelatihan dan Produktivitas Pembina (IV/a) 1 Orang
 - ❖ Penempatan Tenaga Kerja Penata Muda TK I (III/b) 1 orang
 - ❖ Perluasan Kerja Penata Muda TK I (III/b) 1 orang
3. Kepala UPT Penata TK I (III/d) 1 orang
4. Kasubag TU UPT Penata (III/c) 1 orang
5. Instruktur
 - ❖ Instruktur Pelaksana Lanjutan Penata Muda TK I (III/b) 4 orang
 - ❖ Instruktur Muda Penata TK I (III/d) 3 orang
 - ❖ Instruktur Pertama Penata Muda TK I (III/b) 1 orang

❖ Instruktur Penyelia	Penata Muda TK I (III/b)	1 orang
6. Analis bahan penempatan tenaga kerja	Penata TK I (III/d)	1 orang
7. Pengadministrasi Keuangan	Pengatur (II/d)	1 orang
8. Pengadministrasi umum	Penata Muda TK (III/b)	1 orang
9. Pengadministrasi umum	Pengatur I (II/d)	1 orang
10. Pengelola informasi pasar kerja online	PTT/ tenaga honorer	2 org
11. Tenaga Pendamping Pelatihan dan Produktivitas	PTT/ tenaga honorer	2 org
12. Pengadministrasi umum	Juru (I/c)	1 orang
13. Pengelola Kios 3 in 1	PTT/ tenaga honorer	2 org
14. Petugas Kebersihan	PTT/ tenaga honorer	2 org
15. Penjaga Malam	PTT/ tenaga honorer	1 orang
16. Administrasi Kantor	PTT/ tenaga honorer	1 orang

D. Analisis Kendala

Pada bulan Maret 2020 semua kegiatan pada program Peningkatan Kesempatan Kerja tidak dapat dilaksanakan karena dengan adanya pandemi covid-19 dimana mengakibatkan pula terjadinya *refocusing* pada pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sehingga semua Program dan Kegiatan di Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja tahun 2020 pun mengalami pengurangan dari pagu awal sebesar Rp. **496.735.340,-** yang kemudian di ***refocusing*** menjadi Rp. **130.827.410**, dapat diterangkan masing – masing kegiatan di bawah ini :

1. Kegiatan Pelayanan Ketenagakerjaan, Penyusunan Database Tenaga Kerja, dan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja yang meliputi pelayanan pembuatan AK I, Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja, pengendalian penggunaan tenaga kerja asing(TKA) dalam bentuk laporan rutin setiap bulan nya, pendataan lowongan kerja dan penempatan nya, tata kelola penempatan dan perlindungan PMI. Namun selama ini masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal dikarenakan belum adanya pejabat fungsional pengantar kerja di Kabupaten Tanah Laut.
2. Kegiatan Fasilitas Perluasan Kesempatan kerja dengan capaian kegiatan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan (Entrepreneur), selain itu penumbuhan wirausaha baru dilaksanakan melalui Pendampingan Kewirausahaan oleh Tim Mitra Tala Prenuer pada Manunggal Tuntung Pandang.. Di daerah pesisir banyak bermunculan perusahaan yang bergerak di bidang penangka-

pan ikan yang tentunya membutuhkan pekerja dibawah pengawasan Disnaker dan Pemerintah Daerah. Perluasan Kesempatan Kerja Diluar Hubungan Kerja Pasal 40 UU Nomor 13 Tahun 2003 memberikan arahan tentang perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja, yakni : (1) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna. (2) Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan sektor swasta. Pasal 8 PP Nomor 33 Tahun 2013 menetapkan bahwa pembinaan ini dapat dilakukan dalam bentuk program kewirausahaan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja sukarela, dan/atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan pola tersebut dengan : Permodalan; Penjaminan; Pendampingan; . Pelatihan; Konsultasi; Bimbingan Teknis; Penyediaan Data dan/atau Informasi. Peran serta lembaga keuangan juga diharapkan dapat membantu penciptaan program perluasan kesempatan kerja dengan memberikan kemudahan dan fasilitas dalam bentuk fasilitas kredit dan/atau fasilitas penjaminan kredit. Dan pada tahun 2020 Kabupaten Tanah Laut mendapatkan kesempatan bantuan sosial dari Kementerian Tenaga Kerja melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan sasaran para masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang berpotensi menjadi pelaku wirausaha baru dengan penciptaan pertumbuhan tenaga kerja mandiri yang berpotensi melahirkan tenaga kerja informal. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) ini mendapatkan perolehan dana sejumlah **Rp. 200.000.000** dengan masing-masing kelompok mendapatkan bantuan dana JPS Sebesar **Rp.20.000.000**.

E. Saran dan Solusi

Berdasarkan kendala yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan dan disarankan beberapa hal sebagai solusi agar capaian terhadap kinerja utama yang telah ditargetkan sesuai indikator yang ditetapkan ditahun – tahun yang akan datang menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut :

- a. Meminta tambahan formasi CPNS Pengantar Kerja untuk memperkuat fungsi layanan Informasi Pasar Kerja Daerah.
- b. Diadakan nya sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Penempatan tenaga Kerja bagi pemberi kerja. Sosialisasi ini dalam rangka memberikan informasi tentang kewajiban pelaporan adanya informasi lowongan pekerjaan, proses rekrutmen, proses Penempatan hingga pada pelaporan Penempatan
- c. Diharapkan Pemerintah Pusat dan Daerah akan memberikan kemudahan kesempatan kepada para pemberi kerja atau investor dalam berinvestasi yang kemudian akan menetapkan program perluasan kesempatan kerja dengan tujuan akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran
- d. Menetapkan pembinaan yangt dilakukan dalam bentuk program kewirausahaan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja sukarela, dan/atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja

E. Rencana Aksi Tahun 2021

Pada Tahun 2021 akan dilaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

1. Setiap perusahaan yang membuat izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus mencantumkan informasi lowongan pekerjaan.
2. Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Penempatan tenaga Kerja bagi perusahaan dan pemberi kerja perseorangan. Sosialisasi ini dalam rangka memberikan informasi tentang kewajiban pelaporan adanya informasi lowongan pekerjaan, prores rekrutmen, proses Penempatan hingga pada pelaporan Penempatan. Kegiatan ini juga dalam rangka mempersiapkan perusahaan dalam partisipasinya mengikuti pelaksanaan pameran kesempatan Kerja/*job fair* yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

3. Memperkuat layanan Informasi Pasar Kerja Daerah.
4. Melakukan kerjasama dengan UPT BP2MI di Banjarbaru serta Kantor Imigrasi kelas I Banjarmasin dalam upaya meningkatkan kesadaran akan layanan Pekerja Migran Indonesia sampai tingkat kelurahan/desa.
- e. Menargetkan program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan pelatihan soft skill bagi penerima dana bantuan sosial JPS Kemnaker RI Tahun 2021 dengan pemberian materi manajemen usaha yang diisi dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya

iii. Sasaran 3 (Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut memiliki kinerja utama untuk menciptakan hubungan industrial harmonis dan kondusif dengan persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial sebesar 19% dari 11 (sebelas) kasus pada Tahun 2019 menjadi 9 (sembilan) kasus. Dalam pencapaian target memang belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 25%, hal ini disebabkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal.

Upaya peningkatan harmonisasi hubungan industrial juga menjadi sasaran utama bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang lebih memfokuskan pada meningkatnya perlindungan lembaga ketenagakerjaan untuk harmonisasi hubungan industrial. Hal ini terlihat dengan 9 (kasus) yang masuk untuk dibantu penyelesaiannya dapat dieksekusi dengan baik oleh Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sehingga yang pada tahun 2019 hanya mencapai 44% menjadi 100% cakupan sengketa perusahaan - pekerja yang diselesaikan. Sasaran ini disajikan dengan ulasan singkat sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tahun 2020 telah menyelesaikan kegiatan – kegiatan berkenaan dengan kinerja dibidang ketenagakerjaan terutama pada Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Harmonisasi Hubungan Industrial yang kemudian di eksekusi melalui 3 (tiga) kegiatan di Seksi Persyaratan Kerja, Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Seksi Hubungan Industrial, yaitu :

1. Fasilitasi Pelayanan Sistem Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

2. Fasilitas Pelayanan Persyaratan Kerja;
3. Fasilitas dan Pelayanan Kelembagaan Serta Penyelesaian Penelitian Hubungan Industrial.

Pada masing – masing kegiatan memiliki fokus keluaran dan hasil yang berbeda – beda, dapat tergambar pada tabel di bawah ini :

No.	Nama Kegiatan	Keluaran	Hasil	Jumlah Pagu
1.	Fasilitas Pelayanan Sistem Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta Jaminan Sosial Tenagakerja	Capaian Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut	Rp. 19.520.480
2.	Fasilitas Pelayanan Persyaratan Kerja	Jumlah Orang	Terciptanya Pelaku HI yang taat terhadap administrative ketenagakerjaan dalam hal Pencatatan Kontrak Kerja	Rp. 34.944.000
3.	Fasilitas dan Pelayanan Kelembagaan Serta Penyelesaian Penelitian Hubungan Industrial	Jumlah Kasus	Terfasilitasinya penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	Rp. 56.908.580
Total				Rp. 166.294.500

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2020 Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja merealisasikan anggaran sebesar Rp. **108,055,000,-** atau 97,02 % yang mana pada kegiatan fisiknya telah dilaksanakan secara maksimal atau 475,77%. Sebagaimana yang dapat disimak pada tabel dibawah ini :

NO.	KEGIATAN	OUTPUT DALAM DPA	TARGET KINERJA	ANG-GARAN 2020 (Rp)	REALISASI			
					FISIK	%	KEU-AN-GAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Fasilitasi dan Pelayanan Kelembagaan Serta Penyelesaian Penelitian Hubungan Industrial	Terfasilitasinya penyelesaian kasus perse-lisihan hubungan industrial	9 kasus	56.90 8.580	9 ka- sus	10 0	54.55 3.000	95,8 6
2	Fasilitasi Pelayanan Sistem Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Capaian Jumlah Kepesertaan Jaminan So-sial Ketenagakerjaan di Ka-bupaten Tanah Laut	15.500 orang	19.52 0.480	21.08 4	13 6.0 2	18.81 4.000	96,3 8
3	Fasilitasi Pelayanan Persyaratan Kerja	Terciptanya Pelaku HI yang taat terhadap administrasi ketenagakerjaan dalam hal Pencatatan Kontrak Kerja	800 PKWT	34.94 4.000	1.918 PKW T	23 9,7 5	34.68 8.000	99,2 6

C. Sumber Daya Manusia

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tahun 2020 dalam melaksanakan program dan kegiatannya dibantu sumber daya manusia (SDM) yang efektif dan efisien namun tetap solid dalam menghadapi tantangan. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja memiliki tim kerja yang cukup minim dimana hanya ada 5 (lima) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dibantu tenaga honorer sebanyak 1 (satu) orang, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	Maria Ulfah, S.Psi. NIP. 19791113 200501 2 008	Pembina / IV a	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

2.	M. Parhansyah, S.T. NIP. 19760423 200003 1 004	Penata Tk. I / III d	Kepala Seksi Hubungan Industrial
3.	Ibnul Qoyim, S.H. NIP. 19860401 201101 1 002	Penata / III c	Kepala Seksi Persyaratan Kerja
4.	Fadly Fauzan, S.H. NIP. 19870708 201402 1 001	Penata Muda Tk. I / III b	Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
5.	Rani Yasodhara, SKM. NIP. 19810322 200903 2 004	Penata Muda / III a	Analisis Bahan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
6.	Arief Firmanto	PTT/Honorar	Tenaga Pengadministrasian Umum Mediator Perselisihan Hubungan Industrial

D. Analisis Kendala

Pada Tahun 2020, seluruh Dunia mengalami cobaan yang sangat berat begitu juga dengan Indonesia, *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melanda seluruh dunia dan berdampak pada perekonomian Indonesia. Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ini seluruh pagu anggaran pada DPA kegiatan pada lembaga pemerintah di potong hingga 50% bahkan lebih, termasuk DPA pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

Pagu anggaran kegiatan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada awal tahun 2020 sebesar Rp. **228,693,980,-** yang kemudian di *refocusing* sebesar 51,3% menjadi Rp. **111,373,060,-**, maka dapat diterangkan masing – masing Seksi di bawah ini :

1. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Hampir 2 (dua) tahun Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak terjadi perubahan nomenklatur pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2019. Kinerja utama Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja membantu meningkatkan jumlah kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta kepatuhan perusahaan pada sistem pengupahan nasional. Pada pelaksanaannya secara fisik telah terlaksana 136.02% atau 21.084 orang dari target sebesar 15.500 orang, hal ini berkat dukungan dan kerjasama yang baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pelaihari.

Pada tahun 2020 ini pula Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menginisiasi pembentukan Peraturan Bupati Tanah Laut mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yaitu Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 62 Tahun 2020 tentang Program Jaminan Sosial Di Kabupaten Tanah Laut.

2. Seksi Hubungan Industrial

Pada kinerja utama seksi Hubungan Industrial, meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial memiliki 3 (tiga) indikator yaitu tingkat pertumbuhan perusahaan yang membentuk LKS Bipartit, persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama dan persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui anjuran mediasi yang masing – masing capaiannya sebesar 42,85%, 66,66%, dan 33,34%.

Terlihat bahwa terdapat beberapa kendala pada capaian LKS Bipartit akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga tidak banyak aktivitas ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan dan untuk capaian penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama maupun anjuran mediator hal ini masih terkendala belum adanya pejabat fungsional mediator di Kabupaten Tanah Laut sehingga masih memerlukan kerjasama dengan Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Seksi Persyaratan Kerja

Kinerja utama seksi Persyaratan Kerja adalah kepatuhan terhadap penerapan norma syarat – syarat kerja yang memiliki indikator jumlah perusahaan yang melakukan pencatatan PKWT. Pada tahun 2020 terdapat 1918 (seribu sembilan ratus delapan belas) tenaga kerja yang kontrak kerjanya tercatat.

Hal-hal yang berpengaruh dari tingkat kepatuhan terhadap pemenuhan norma syaker ini diantaranya durasi lama bekerja pekerja kontrak yang tidak terlalu lama sehingga Perusahaan enggan melakukan pencatatan kontrak. Selain daripada itu terdapat juga faktor lain yaitu berupa implikasi atau dampak terhadap tinggi rendahnya pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi terhadap para pelaku usaha di Kabupat-

en. Semakin tinggi ketidakpatuhan yang ditemukan oleh pengawas berbanding lurus dengan semakin tingginya pencatatan kontrak kerja dilaksanakan.

Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut berkurang sehubungan dengan terbitnya surat nomor : 566/204/Disnakertrans tanggal 1 Februari 2017 tentang penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan, sesuai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga hal – hal yang berkaitan dengan penegakan hukum yang salah satunya misalnya adalah pengecekan terhadap pelaksanaan pencatatan kontrak kerja.

E. Saran dan Solusi

Berdasarkan kendala yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan dan disarankan beberapa hal sebagai solusi agar capaian terhadap kinerja utama yang telah ditargetkan sesuai indikator yang ditetapkan ditahun – tahun yang akan datang menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut :

1. Harus membuka informasi kepada para pihak terkait akan pentingnya pencatatan kontrak kerja;
2. Harus memiliki alat yang berfungsi sebagai rekam jejak digital yang dikemas dalam bentuk register. Selain itu software ini juga berfungsi sebagai pengingat terhadap perusahaan ketika masa kontrak kerja akan berakhir;
3. Terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial perlu diadakan pejabat fungsional mediator yang khusus menangani kegiatan mediasi, yang selama ini sudah lama tidak dimiliki oleh Kabupaten Tanah Laut;
4. Memaksimalkan fungsi aplikasi siManja untuk memberikan layanan ketenagakerjaan yang lebih baik;
5. Memaksimalkan fungsi aplikasi wajib lapor online yang saat ini belum semua perusahaan di Kabupaten Tanah Laut mendaftarkan perusahaannya di aplikasi ini.

F. Rencana Aksi Tahun 2021

Bahwa sesuai dengan saran dan solusi yang kami ajukan maka harapan kami kedepan pada tahun 2021 akan melaksanakan sebagai berikut :

1. Meminta kepada Badan Kepegawaian terkait untuk segera mengisi jabatan fungsional mediator yang telah lulus dalam CPNS tahun 2020;

2. Memanfaatkan dan mengolah data wajib lapor perusahaan di Kabupaten Tanah Laut;
3. Membuat sosialisasi ketenagakerjaan dengan nomenklatur terkait urgensi pencatatan PKWT yang dilaksanakan dan didanai penganggarnya melalui APBD tahun berjalan;
4. Memaksimalkan software Sistem Manajemen Norma Kerja (siManja) untuk mempermudah kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

iv. **Sasaran 4 Pada Perjanjian Kerja (Meningkatnya kontribusi sektor industri)**

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut memiliki kinerja utama pada Kontribusi pada Sektor Industri. Dari data BPS terlihat adanya penurunan kontribusi di sektor Perindustrian. Penurunan kinerja sektor industri ditandai dengan menurunnya Persentase Peranan Industri pengolahan, dimana share PDRB tahun 2018 sebanyak 12,79, menurun 0,30 poin menjadi 12,49 di Tahun 2019. Sedangkan laju pertumbuhan di sektor pengolahan juga mengalami penurunan sebesar 3,16 poin dimana pada tahun 2018 laju pertumbuhan 5,79 menjadi 2,63 di tahun 2019. Hal ini terjadi **dikarenakan menurunnya harga komoditas CPO di Dunia**. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa sub kategori yang mendominasi kinerja industri di tanah laut adalah industri makanan dan minuman. Produksi industri makanan dan minuman rata-rata mencapai dari 60 persen dari total produksi industri pengolahan secara keseluruhan di Tanah Laut. Komoditas utama dari Industri Makanan minuman di tanah laut adalah Crude Palm Oil (CPO). Oleh karena itu, kinerja industri makanan dan minuman tanah laut tidak terlepas dari pengaruh dinamika perekonomian global. Di Tanah Laut Kinerja Industri CPO ini di dukung oleh Kinerja Subkategori perkebunan komoditas kelapa sawit yang terkonsentrasi di beberapa wilayah sentra produksi utama (Kecamatan Pelaihari, Jorong dan Kintap).

Upaya peningkatan Kontribusi Sektor Industri yang telah dilaksanakan antara lain disajikan pada uraian singkat sebagai berikut :

G. Program dan Kegiatan

Pada Bidang Perindustrian, ada 4 program dan 5 kegiatan antara lain sebagai berikut :

A.1 Program Pembangunan Sumber Daya Industri yang diampu oleh Seksi Pembangunan Sumberdaya Industri, dimana pada seksi ini terdiri dari 2 kegiatan, seperti tergambar pada tabel dibawah ini :

No.	Nama Kegiatan	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Output dalam DPA	Target Kinerja	Jumlah Pagu	Realisasi	Fisik	Keu
1.	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah terhadap Pem-anfaatan Sumber Daya Indus-tri dan	Pelatihan IKM Baru	Peningkatan Ket-erampilan Masyarakat yang Berpotensi menjadi Pelaku In-dustri	135 orang	Rp. 320.468.000,-	Rp. 299.219.033,-	100%	93,37 %.
2.	Pengembangan Sistem Produksi, Ino-vasi dan Teknologi Indus-tri	Pengem-bangan Inovasi dan Teknologi Sistem Produksi	Inovasi dan Penggunaan Teknologi dalam Produksi IKM	30 IKM	Rp. 60.734.600,-	Rp. 47.897.500,-	100%	78.86 %

A.2 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri yang diampu oleh Seksi Sarana Prasarana Industri, dimana pada seksi ini terdiri dari 2 kegiatan, seperti tergambar pada tabel dibawah ini :

No.	Nama Kegiatan	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Output dalam DPA	Target Kinerja	Jumlah Pagu	Realisasi	Fisik	Keu
1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster In-dustri	Fasilitasi Penye-diaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri	Jumlah Klaster Industri	2 KI	Rp. 106.953.800	Rp. 67.161.000	100%	62,79 %.
2.	Pengemban-gan Sistem Informasi Data dan Standar-isasi Industri	Pengembangan Sistem Informasi Data dan Standar-isasi Industri	Jumlah IKM	3300 IKM	Rp. 144.805.400	Rp. 127.983.400	100%	88,38 %.

A.3 Program Pemberdayaan Industri Unggulan Daerah, dimana pada seksi ini terdiri dari 1 kegiatan, seperti tergambar pada tabel dibawah ini :

No.	Nama Kegiatan	Kinerja Utama/ Sasaran Strat-egis	Output dalam DPA	Target Kinerja	Jumlah Pagu	Real-isasi	Fisik	Keu
1.	Peningkatan	Promosi dan	meningkatnya	2 kali	Rp. 84.895.900,-	Rp.	200%	79,95

	Kerjasama, Promosi dan Investasi, Kegiatan Pem- berdayaan Industri Unggu- lan Daerah	Lomba Produk IKM	promosi produk IKM unggulan			67.876 .780,-		%.
--	--	---------------------	-----------------------------------	--	--	------------------	--	----

Dapat kami informasikan bahwa di bawah Bidang Perindustrian, khususnya berkait-
tan dengan Promosi Produk IKM, kami memiliki 2 tempat promosi yaitu Dekranasda
dan Pusat Promosi Sentra IKM Tambang Ulang. Pada kedua tempat promosi ini,
sistem yang dipakai adalah titip jual, dimana IKM menitipkan produknya untuk dijual
dan dipromosikan. Adapun penjualan produk IKM di kedua tempat tersebut selama
Tahun 2020 adalah sbb :

No.	Bulan	LOKASI	
		Dekranasda	Puspro Tambang Ulang
1.	Januari	Rp 4.116.000,-	-
2.	Februari	Rp 6.425.000,-	Rp 470.000,-
3.	Marer	Rp 6.807.000,-	Rp1.610.000,-
4.	April	Rp 5.935.000,-	Rp 538.000,-
5.	Mei	Rp 5.170.000,-	Rp 638.000,-
6.	Juni	Rp 7.390.000,-	Rp 994.000,-
7.	Juli	Rp 8.070.000,-	Rp2.621.000,-
8.	Agustus	Rp 7.433.000,-	Rp2.099.000,-
9.	September	Rp23.714.000,-	Rp1.100.000,-
10.	Oktober	Rp17.738.000,-	Rp2.250.000,-
11.	November	Rp31.733.000,-	Rp3.448.000,-
12.	Desember	Rp32.422.000,-	Rp8.455.000,-
	TOTAL	Rp. 156.953.000,-	Rp. 24.223.000,-

H. Kinerja Sektor Industri dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Pertumbuhan Peningkatan Jumlah Industri

	Tahun 2019	Tahun 2020
Jumlah Industri Besar	51	50
Jumlah Industri Menengah	65	65

Jumlah Industri Kecil	3128	3378
-----------------------	------	------

Tabel Pertumbuhan Peningkatan Industri Formal

	Tahun 2019	Tahun 2020
Jumlah Industri Formal	19	47

I. Sumberdaya Manusia

Bidang Perindustrian Tahun 2020 dalam melaksanakan program dan kegiatan dibantu oleh 4 (empat) orang Aparatur Sipil Negara dan 7 (tujuh) tenaga PTT. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Nama/Nip	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Nurmaya Savitri, ST, MT NIP. 19820529 200903 2 007	Penata TK.I / III d	Kabid Perindustrian
2.	Andhika Putri, ST NIP. 19870129 201101 2 001	Penata / III c	Kasi Pembangunan SDI
3.	Zainudin Alwi, ST	Penata Muda TK.I / III b	Kasi Sarana dan Prasarana Industri
4.	Drs. Mahdiyani, MT NIP. 19660518 199602 1 004	Pembina TK.I / IV b	Analisis Fasilitas Litbang Teknologi
5.	Damay, A.Md	NON PNS	Fasilitator Pendamping untuk Promosi IKM.
6.	Nia Nurcahyati, A.Md	NON PNS	Penjaga Showroom Dekranasda
7.	Sri Ayu Wulandari	NON PNS	Penjaga Showroom Dekranasda
8.	Fadhilla	NON PNS	Penjaga Showroom Gedung Puspro
9.	M. Yasin	NON PNS	Jaga Malam Dekranasda
10.	Rudi	NON PNS	Jaga Malam Puspro
11.	Sandiko Petrus Wirapati	NON PNS	Penjaga Showroom Dekranasda

J. Analisis Kendala

Pada awal Tahun 2020, seluruh bagian Dunia mengalami sebuah pandemi yang sangat berat yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Pandemi ini ternyata terus berlangsung sepanjang tahun 2020 dan tentu saja berdampak pada perekonomian Indonesia terutama Pariwisata dan Perindustrian. Kegiatan perindustrian dengan berbagai pertimbangan terus dilakukan diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan IOMKI (Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri). Akibat adanya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ini seluruh pagu anggaran pada DPA kegiatan pada lembaga pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut di potong hingga 50% bahkan lebih. Tidak terkecuali DPA pada Bidang Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Pagu anggaran kegiatan Bidang Perindustrian pada awal tahun 2020 sebesar Rp. **2.036.396.200,-** yang kemudian di *refocusing* sebesar 64,7% menjadi Rp. **717.857.700,-**, maka dapat diterangkan masing – masing Seksi di bawah ini :

1. Seksi Pembangunan Sumberdaya Industri

Kegiatan pelatihan pada tahun 2020 mengalami perubahan pola yang cukup signifikan. Pelatihan yang biasanya menggunakan sistem tatap muka, dengan adanya pandemic ini berubah pola menjadi pelatihan berbasis daring (*online*) dengan menggunakan media ZOOM maupun Video Conference.

Beberapa pelatihan yang mengalami refocusing antara lain :

- Pelatihan Desain Kemasan
- Pelatihan Pengolahan Hasil Laut
- Pelatihan Pengolahan Berbahan Jagung
- Pelatihan Pemanfaatan Tanduk Sapi
- Pelatihan Teknologi Pembuatan Produk Kulit
- Pelatihan Pembuatan Boneka Rajut
- serta Pemagangan ke Balai Kulit Karet dan Plastik Yogyakarta.

Namun di sisi lain, Pemerintah Pusat memberikan support melalui anggaran dari Dana Dekonsentrasi Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian RI terhadap Kabupaten Tanah Laut berupa anggaran pelatihan sebanyak 5 kegiatan yang dilaksanakan dengan pola daring. Pelatihan tersebut antara lain :

- Pelatihan Pembuatan Masker 3 lapis Berbasis Sasirangan,
- Pelatihan Pembuatan Hazmat Suit,

- Pelatihan Pembuatan Faceshield Berbasis Sasirangan,
- Pelatihan Pengolahan Produk Minuman Herbal dan
- Pelatihan Pembuatan Alat CTPS Portable bagi IKM Perbengkelan.

Salah satu kegiatan yang telah dianggarkan yaitu Kegiatan Pengembangan Kreativitas, Desain dan Jasa Industri dengan Kinerja Utama Pengembangan kreativitas desain kemasan produksi juga terkena refocusing sehingga tidak bisa dilaksanakan.

2. Seksi Sarana dan Prasarana Industri

Seksi Sarana dan Prasarana Industri merupakan salah satu upaya mencapai kinerja sektor industri melalui perubahan nomenklatur pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2019. Indikator Kinerja utamanya adalah pertumbuhan Sektor industri yang dilakukan melalui pendataan yang dilakukan oleh tenaga pendata yang sebagian besar merupakan pelaku IKM sendiri. Proses pendataan sempat terhambat akibat adanya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah IKM dari 3.128 industri menjadi 3.378 industri atau terjadi peningkatan sebesar 7,9 % .

Pemotongan anggaran pada Kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Industri mengakibatkan kegiatan Penyusunan Delienasi Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Tanah Laut dan perencanaan DED Sentra IKM di Desa Tanjung Dewa tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2020.

Tidak terlaksananya kegiatan ini kemungkinan bisa menghambat proses investasi di Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Bati Bati karena adanya Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 500/1926-Perekobang/VI/2020 Tentang Penundaan Perizinan Untuk Industri dan Usaha Peternakan Di Kecamatan Bati Bati dan Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut.

3. Seksi Pemberdayaan Industri

Seksi Pemberdayaan Industri mengalami dampak yang cukup besar akibat adanya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Kegiatan pameran yang sudah direncanakan pada tahun sebelumnya mengalami penundaan bahkan akhirnya mengalami pembatalan karena kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang tidak kunjung menurun. Adanya kebijakan protokol kesehatan untuk

kegiatan ke luar daerah juga membuat kegiatan tidak bisa dilakukan secara maksimal.

K. Saran

Berdasarkan kendala yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan dan disarankan beberapa hal sebagai solusi agar capaian terhadap kinerja utama yang telah ditargetkan sesuai indikator yang ditetapkan ditahun – tahun yang akan datang menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan PTT dan Tenaga Ahli untuk membantu proses pencapaian kinerja yang ditetapkan antara lain Tenaga Ahli Penyuluh Perindustria, Tenaga hli Standarisasi Industri dan Tenaga Ahli Promosi Produk IKM Berbasis IT.
2. Perlunya penambahan anggaran untuk menyusun regulasi yang bisa mendorong pertumbuhan investasi industri di Kabupaten Tanah Laut, seperti anggaran Pembuatan Deliniasi KI di Jorong dan Panyipatan, DED Pola Pengembangan Sentra IKM di Tanjung Dewa.
3. Perlunya Pengadaan Mobil Toko sebagai pusat promosi Produk IKM dan dapat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemerintahan, seperti misalnya kegiatan Manunggal Tuntung Pandang.
4. Perlunya Rumah Kemasan untuk membantu IKM dalam memperbaiki kualitas produknya
5. Perlunya koordinasi dengan pusat mengenai pembangunan Fisik Sentra IKM Tanjung Dewa dengan menggunakan dana DAK.

G. Rencana Aksi 2021

Bahwa sesuai dengan saran yang kami ajukan maka kami pada tahun 2021 akan melaksanakan sebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan PTT dan Tenaga Ahli untuk membantu proses pencapaian kinerja yang ditetapkan;
2. Mengusulkan penambahan anggaran untuk menyusun regulasi yang bisa mendorong pertumbuhan investasi industri di Kabupaten Tanah Laut, seperti anggaran Pembuatan Deliniasi KI di Jorong dan Panyipatan, serta DED Pola Pengembangan Sentra IKM di Tanjung Dewa.

3. Mengusulkan Pengadaan Mobil Toko sebagai pusat promosi Produk IKM dan dapat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemerintahan, seperti misalnya kegiatan Manunggal Tuntung Pandang.
4. Mengusulkan Rumah Kemasan untuk membantu IKM dalam memperbaiki kualitas produknya dengan menggunakan dana DAK.
1. Mengusulkan ke Kementrian Perindustrian mengenai pembangunan Fisik Sentra IKM Tanjung Dewa dengan menggunakan dana DAK

v. Sasaran 5 Pada Perjanjian Kerja (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD)

Sasaran ini dicapai dengan melihat nilai daripada Sakip Disnakerind, untuk nilai Sakip tahun 2019 memperoleh nilai 71,40 dengan kategori BB (Sangat Baik), Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal.

Pencapaian ini didukung dengan kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi tata kelola kesekretariatan, perkantoran, perencanaan kebutuhan, pencatatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pelayanan tamu, rapat-rapat dan lain-lain terkait dengan tugas dan fungsi. Tata kelola administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, terkait tugas dan fungsi.

Pada sektor perencanaan dan keuangan juga dilaksanakan kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan pembuatan laporan baik keuangan dan laporan kinerja yang telah diterbitkan yaitu : Renja Perubahan 2020, Renja 2021, Pencapaian kinerja selama 12 bulan, laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan, Laporan AKIP, dan LKPJ serta LPPD tahun 2019.

Untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis diperlukan terobosan dan inovasi oleh unit kerja SKPD. Pada Tahun 2020 melalui Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat meluncurkan sebuah Inovasi Baru, yaitu **SI Kijang**.

SI KIJANG adalah sebuah inovasi Sistem Informasi Kinerja dan Keuangan melalui kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang terin-

tegrasi. SI Kijang dibangun oleh Subbag Perencanaan dan Keuangan pada unit kerja Sekretariat, Hal ini diambil sebagai langkah dalam meningkatkan sistem pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja, yang layanannya terdiri atas :

- a. Verifikasi dan pengendalian
- b. Pencetakan kwitansi
- c. Pencetakan laporan kinerja program dan Kegiatan
- d. Evaluasi

Inovasi SI KIJANG ini juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 sebagaimana visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut yaitu “**BERINTERAKSI**”, tepatnya pada poin :Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) (poin 3 dari 5).

Inovasi SI KIJANG ini juga selaras dengan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yaitu Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD.

SI Kijang memiliki banyak manfaat bagi SKPD Disnakerind, antara lain:

1. Mempercepat dan mempermudah pengendalian dan verifikasi keuangan;
2. Mengurangi kesalahan dalam pencetakan kwitansi;
3. Meningkatkan kualitas pelaporan capaian program dan kegiatan;
4. Meminimalisir adanya temuan pada pertanggungjawaban keuangan
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaporan kinerja dan keuangan SKPD;
6. Memudahkan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD;
7. Meningkatkan kualitas pengendalian internal SKPD;
8. Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD

Bagi daerah Kabupaten Tanah Laut SI Kijang berperan sebagai :

1. Daya ungkit peningkatan akuntabilitas kinerja daerah (menaikkan nilai sakin kabupaten)
2. Daya ungkit peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan (*good governance*)

A. Realisasi Kinerja Fisik dan Keuangan

Realisasi Kinerja Fisik dan Keuangan dapat dilihat secara lengkap pada table berikut :

NO	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (%)			
					Fisik	%	Keuangan	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	1,093,274,797	Baik	100.0	995,884,943	91.09
1	Penyediaan Rapat-Rapat,Konsultasi, dan Koordinasi	Jumlah Orang	1700 (org)	421,695,261	741 org	44	376,403,567	89.26
2	Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Jenis	35 Jenis	260,441,680	35 jenis	100	223,506,761	85.82
3	Penyediaan jasa Penunjang Kinerja SKPD	Jumlah Orang	18 (org)	411,137,856	18 (org)	100	395,974,615	96.31
II	Program Pemenuhan , Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	517,155,411	Baik	100	483,573,844	93.51
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Jenis	4 Jenis	198,353,925	4	100	189,546,000	95.56
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Jenis	16 Jenis	110,825,000	15 (jenis)	95	88,226,303	79.61
6	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Pagar Gedung Kantor	1 Gedung	44,940,000	1 gedung	100	43,998,402	97.90
7	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	1 Gedung	156,636,486	64 Orang	100	155,403,139	99.21
8	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Jumlah Orang	16 Org	6,400,000	-	100	6,400,000	100.00
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Stel PDH	65 Stell Pakaian	0	-	0	0	-
III	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	39,939,799	Baik	100	20,000,000	50.08
10	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran	2 Pameran	19,939,799	-	0	0	-
11	Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi SKPD	Jumlah Sistem Informasi	2 Aplikasi Sistem Informasi SKPD	20,000,000	2	100	20,000,000	100.00
IV	Program Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	BB	20,998,660	BB	100	19,213,800	91.50
12	Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen Perencanaan	6,999,600	2 Dok	100	6,771,800	96.75

13	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen dan Laporan	2 Dokumen dan Laporan	6,999,360	2 Dok & 18 Lap	95	6,764,200	96.64
14	Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen dan Laporan	3 Dokumen dan Laporan	6,999,700	3 Dok & 16 Lap	100	5,677,800	81.11
	JUMLAH			1,671,368,667		94,7	1.518.672.587	90.86

B. Sumberdaya Manusia

Kesekretariatan Tahun 2020 dalam melaksanakan program dan kegiatan dibantu oleh 6 (enam) orang Aparatur Sipil Negara dan 7 (tujuh) tenaga PTT. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------------|---------|
| 1. | Sekretaris | Pembina (IV/b) | 1 orang |
| 2. | Kepala Sub Bagian | | |
| | ❖ Umum dan Kepegawaian | Penata Tk.I (III/d) | 1 Orang |
| | ❖ Perencanaan dan Keuangan | Penata (III/c) | 1 orang |
| 3. | Pengelola Sarpras Kantor | Penata TK I (III/d) | 1 orang |
| 4. | Analisis Tata Laksana | Penata Muda (III/a) | 1 orang |
| 5. | Bendahara Pengeluaran | Penata Muda (III/a) | 1 orang |
| 6. | Tenaga Administrasi Front Office | PTT/ tenaga honorer | 1 orang |
| 7. | Tenaga Administrasi RK | PTT/ tenaga honorer | 2 orang |
| 8. | Tenaga Administrasi IT | PTT/ tenaga honorer | 1 orang |
| 9. | Tenaga Administrasi IT | PTT/ tenaga honorer | 1 orang |
| 10. | Sopir | PTT/ tenaga honorer | 1 orang |
| 11. | Petugas Kebersihan | PTT/ tenaga honorer | 1 orang |
| 12. | Penjaga Malam | PTT/ tenaga honorer | 1 orang |

C. Analisis Kendala

Beberapa Kendala yang dihadapi dan menjai tanggungjawab di Kesekretariatan adalah :

1. Sarana Prasarana Gedung yang sangat terbatas dalam memberikan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian
2. Jumlah armada Kendaraan Bermotor Roda 4 yang masih terbatas.
3. Tidak adanya Tenaga ASN Pengelola Gaji dan Verifikator
4. Alokasi anggaran yang masih sangat terbatas dalam menunjang Belanja urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian

F. Saran dan Solusi

Berdasarkan kendala yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan dan disarankan beberapa hal sebagai solusi agar capaian terhadap kinerja yang telah ditargetkan sesuai indikator yang ditetapkan ditahun – tahun yang akan datang menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya Gedung Kantor yang lebih refresentatif dalam memberikan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian
2. Penambahan Armada Kendaraan Bermotor Roda 4 untuk mendukung operasional pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian
3. Penambahan Tenaga ASN Pengelola Gaji dan Verifikator untuk mengoptimalkan tertib administrasi keuangan.
4. Penambahan pagu anggaran dalam menunjang Belanja urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian khususnya dalam program-program pemulihan ekonomi dampak Pandemi dan pasca bencana banjir dan longsor.

E. Rencana Aksi Tahun 2021

Pada Tahun 2021 akan dilaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

1. Meminta pembangunan Gedung Kantor yang lebih refresentatif dalam memberikan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian di area samping Gedung Kantor yang ada.
2. Mengajukan Penambahan Armada Kendaraan Bermotor Roda 4 untuk mendukung operasional pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian melalui pengadaan pada APBD maupun pengalihan asset dari armada lama SKPD lain yang masih layak pakai.
3. Meminta Penambahan Tenaga ASN Pengelola Gaji dan Verifikator pada BKPSDM untuk mengoptimalkan tertib administrasi keuangan.
4. Mengajukan Penambahan pagu anggaran dalam Renja SKPD untuk menunjang Belanja urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian khususnya dalam program-program pemulihan ekonomi dampak Pandemi dan pasca bencana banjir dan longsor.

1. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Anggaran Dan Realisasi APBD 2020

- BELANJA TIDAK LANGSUNG

Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2020 :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real- iasasi
1.	Gaji dan tunjangan	4.223.871.255	2.598.065.086	61,51
2.	Tambahan penghasi- lan berdasarkan beban kerja	2.989.425.759	2.373.055.960	79,38

- BELANJA LANGSUNG

Jumlah belanja langsung untuk tahun anggaran 2020 setelah peru-
bahan ditetapkan sebesar **Rp. 3.568.952.271,-** jumlah ini dipergunakan un-
tuk membiayai program-program dan kegiatan, yang terdiri atas 14 (empat
belas) program yang terdiri atas 38 (tiga puluh delapan) kegiatan dengan re-
alisasi sebesar **Rp. 2.979.683.731,-** atau tercapai 83,48 %.

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Tahun 2020 berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada
Tabel berikut :

A. DINAS

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Per- kantoran	1.093.274.797	995.884.943	91,09

1	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	260.441.680	223.506.761	85,82
2	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	421.695.261	376.403.567	89,26
3	Penyediaan jasa penunjang Kinerja SKPD	411.137.856	395.974.615	96,31
2	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	517.155.411	483.573.844	93,51
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	198.353.925	189.546.000	95,56
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	110.825.000	88.226.303	79,61
6	Pembangunan Gedung Kantor	44.940.000	43.998.402	97,90
7	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	156.636.486	155.403.139	99,21
8	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	6.400.000	6.400.000	100
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	-
3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	20.998.660	19.213.800	91,50
10	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	6.999.600	6.771.800	96,75
11	Penyusunan laporan keuangan	6.999.360	6.764.200	96,64
12	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	6.999.700	5.677.800	81,11
4	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	365.378.550	161.485.450	44,20
13	Pelatihan Tenaga Kerja Siap Pakai	239.975.250	76.989.350	32,08
14	Peningkatan Produktivitas kerja dan peningkatan kapasitas lembaga pelatihan kerja	29.152.560	12.885.400	44,20
15	Pengembangan Sistem Pelatihan Kerja	96.250.740	71.610.700	74,40
5	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	130.827.410	92.890.280	71

16	Pelayanan ketenagakerjaan, penyusunan database tenaga kerja dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	81.633.450	62.253.080	76,26
17	Fasilitasi perluasan kesempatan kerja	49.193.960	30.637.200	62,28
6	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Harmonisasi Hubungan Industrial	111.373.060	108.055.000	97,02
18	Fasilitasi Pelayanan Persyaratan Tenaga Kerja	34.944.000	34.688.000	99,27
19	Fasilitasi Pelayanan Sistem Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga kerja	19.520.480	18.814.000	96,38
20	Fasilitasi dan Pelayanan Kelembagaan serta Penyelesaian Penelitian Hubungan Industrial	56.908.580	54.553.000	95,86
7	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	39.939.799	20.000.000	50,08
21	Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	19.939.799	0	0
22	Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi SKPD	20.000.000	20.000.000	100
8	Program Pemberdayaan Industri Unggulan Daerah	84.895.900	67.876.780	79,95
23	Peningkatan kerjasama ,Promosi dan investasi Industri	84.895.900	67.876.780	79,95
9	Program Pembangunan Sumberdaya Industri	381.202.600	347.116.533	91,06
24	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Industri	320.468.000	299.219.033	93,37
25	Pengembangan Sistem Produksi, Inovasi dan Teknologi Industri	60.734.600	47.897.500	78,86
26	Pengembangan Kreativitas, Desain dan Jasa Industri	0	0	-
10	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	251.759.200	194.478.400	77,25

27	Penyediaan sarana dan prasarana klaster industri	106.953.800	66.495.000	62,17
28	Pengembangan Sistem Informasi Data dan Standarisasi Industri	144.805.400	127.983.400	88,38
JUMLAH		2.996.805.387	2.490.575.030	83,11

B. UPT. BLK

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	REALISASI	
			Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	365,477,716	271,711,215	74.34%
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	129,549,732	54,956,076	42.42%
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	11,175,300	7,967,050	71.29%
3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3,600,000	130,000	3.61%
4	Penyediaan alat tulis kantor	8,983,600	6,629,000	73.79%
5	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	1,349,700	1,175,100	87.06%
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,696,600	2,241,000	83.10%
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2,250,000	2,250,000	100.00 %
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,800,000	1,680,000	93.33%
9	Penyediaan makanan dan minuman	2,250,000	270,000	12.00%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70,000,000	65,534,850	93.62%
11	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	131,822,784	128,878,139	97.77%
2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerjaan	1,073,571,910	463,494,700	43.17%
1	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	30,600,000	27,000,000	88.24%
2	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	45,000,000	45,000,000	100.00 %
3	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK	647,971,910	167,141,000	25.79%
4	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi			64.10%

Pencari Kerja	350,000,000	224,353,700	
JUMLAH	1,439,049,626	735,205,915	51.09%

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

i. Sasaran 1 (Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja)

Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Kinerja Utama Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja ditandai dengan Indikator “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)”.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020 ini mencapai 72,03% atau naik 5,18% dari tahun sebelumnya sebesar 66,85%.

Untuk mendukung capaian di atas dilaksanakan Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan capaian meningkatnya kompetensi tenaga kerja sebesar 66,19% dari target 60% yang didukung dari dana APBD sebesar Rp. 230.256.400 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 175.957.900,- atau 76,42% dan melalui dana APBN sebesar Rp. 2.200.630.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.060.278.050,- atau 93,62%. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas (APBD), dengan didukung kegiatan :
 - a. Pelatihan Tenaga Kerja Siap Pakai
Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (pelatihan tenaga kerja siap pakai) dengan capaian pelaksanaan 6 paket kegiatan pelatihan ke desa-desa dari jumlah dana Rp.104.853.100,- dengan realisasi keuangan Rp.91.461.800,- atau 87,23%
 - b. Peningkatan Produktivitas Kerja dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja dengan capaian 15 orang pengelola lembaga pelatihan kerja dalam manajemen dan peningkatan mutu kelembagaan dari jumlah dana sebesar Rp. 29.152.560,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.260.400,- atau 45,49%.
 - c. Pengembangan Sistem Pelatihan Kerja dengan hasil capaian berupa 10 orang peserta pemagangan dalam negeri berbasis pengguna dari jumlah dana Rp. 96.250.740,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 71.235.700,- atau 74,01%.

2. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (APBN), dengan kegiatan yaitu :

- b. Kegiatan Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja dengan capaian 18 paket pelatihan berbasis kompetensi dengan alokasi dana APBN sebesar Rp. 2.200.630.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.060.278.050,- atau 93.62%

ii. Sasaran 2 (Meningkatnya Pelayanan Penempatan Kerja)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada Tahun pada tahun 2020 berhasil meningkatkan pelayanan penempatan kerja sebesar 7.29% dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan 182 orang dari 2496 pencari Kerja yang terdaftar. Sasaran ini dicapai dengan dukungan Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan capaian program meningkatkan kesempatan kerja sebesar 96,43% dari target 3,5%, dari jumlah dana Rp.130.827.410,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 92.889.480,- atau 71,00 %. Untuk mendukung capaian program ini dilaksanakan beberapa kegiatan :

1. Pelayanan Ketenagakerjaan, Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah, dan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, dengan anggaran sebesar Rp. 81.633.450,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 62.252.280,- atau 76,26 %.
2. Fasilitasi Perluasan Kesempatan kerja dengan capaian Pelatihan Berbasis Kewirausahaan (Entrepreneur) dari jumlah dana Rp. 49,193,960,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.637.200,- atau 62,28 %.

iii. Sasaran 3 (Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut memiliki kinerja utama untuk menciptakan hubungan industrial harmonis dan kondusif dengan persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial sebesar 19% dari 11 (sebelas) kasus pada Tahun 2019 menjadi 9 (sembilan) kasus di tahun 2020. Dalam pencapaian target memang belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 25%, hal ini disebabkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tahun 2020 telah menyelesaikan kegiatan – kegiatan berkenaan dengan kinerja dibidang ketenagakerjaan terutama pada Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Harmo-

nisasi Hubungan Industrial yang kemudian di eksekusi melalui 3 (tiga) kegiatan di Seksi Persyaratan Kerja, Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Seksi Hubungan Industrial, yaitu : Fasilitas Pelayanan Sistem Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Fasilitas Pelayanan Persyaratan Kerja dan Fasilitas dan Pelayanan Kelembagaan Serta Penyelesaian Penelitian Hubungan Industrial.

Realisasi Anggaran

Pada tahun 2020 Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja merealisasikan anggaran sebesar Rp. **108,055,000,-** atau 97,02 % dari anggaran sebesar Rp. **111,373,060,** yang mana pada kegiatan fisiknya telah dilaksanakan secara maksimal atau 475,77% yang terbagi dalam 3 kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitas Pelayanan Persyaratan Kerja, dengan anggaran sebesar Rp. 34.944.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.688.000,- atau 99,26 %.
2. Fasilitas Pelayanan Sistem Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari jumlah dana Rp. 19.520.480,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.814.000,- atau 96,38 %.
3. Fasilitas dan Pelayanan Kelembagaan Serta Penyelesaian Penelitian Hubungan Industrial dari jumlah dana Rp. 56.908.580,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 54.553.000,- atau 95,86 %.

iv. Sasaran 4 Pada Perjanjian Kerja (Meningkatnya kontribusi sektor industri)

Penurunan kinerja sektor industri ditandai dengan menurunnya Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB sebesar 12,49 % yaitu Rp. 1.184.780.000.000,- dari PDRB Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 10.370.450.000.000,-. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang Tahun 2020.

Untuk mendukung capaian di tahun 2020 dilaksanakan beberapa program dengan realisasi pendanaan :

1. Program Pembangunan Sumber Daya Industri, Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Industri dengan hasil capaian berupa Peningkatan Keterampilan Masyarakat yang Berpotensi menjadi Pelaku Industri sebanyak 135 orang dari jumlah dana Rp.

320.468.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 299.219.033,- atau 93,37 %.

2. Program Pembangunan Sumber Daya Industri, Kegiatan Pengembangan Sistem Produksi, Inovasi dan Teknologi Industri dengan hasil capaian Meningkatnya Inovasi dan Penggunaan Teknologi dalam Produksi IKM sebanyak 30 IKM dari jumlah dana Rp. 60.734.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.897.500,- atau 78,86 %.
3. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri dan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Data dan Standarisasi Industri dengan hasil capaian terpeliharanya Gedung Dekaranasda dan Pendataan Industri Tahun 2020 dari jumlah dana Rp. 251.759.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 195.144.400,- atau 77,51 %.
4. Program Peningkatan Kerjasama, Promosi dan Investasi, Kegiatan Pemberdayaan Industri Unggulan Daerah dengan capaian meningkatnya promosi produk IKM unggulan melalui keikutsertaan pada 4 kali pameran di dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi dari jumlah dana Rp. 84.895.900,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 67.876.780,- atau 79,95 %.

v. Sasaran 5 Pada Perjanjian Kerja (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD)

Sasaran ini dicapai dengan melihat nilai daripada Sakip Disnakerind, untuk nilai Sakip tahun 2019 memperoleh nilai 71,40 dengan kategori BB (Sangat Baik), Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal.

Untuk realisasi keuangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan hasil capaian tercapainya administrasi perkantoran yang baik dari jumlah dana Rp. **1.411.203.581,-** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **1.252.190.389,-** atau 88,73 %
2. Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan hasil capaian terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta meningkatnya kapasitas ASN Dinas dari

jumlah dana Rp. **666.520.411,-** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **624.915.299,-** atau 93,75 %.

3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan hasil capaian terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan dinas dari jumlah dana Rp. **20.998.660,-** dengan realisasi keuangan sebesar Rp**19.213.800,-** atau 91,50 %.
4. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD dengan hasil capaian tersampainya informasi pembangunan kepada masyarakat dari jumlah dana Rp. **39.939.799,-** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **20.000.000,-** atau 50,08 %

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2020

- Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

L. DINAS

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,140,522,911	1,065,343,050	93.41
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150,888,437	132,604,381	87.88
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	27,952,900	24,574,900	87.92
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6,297,500	5,534,200	87.88
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15,750,000	15,000,000	95.24
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13,673,700	13,657,400	99.88
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,099,950	8,099,800	100.00

7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5,802,000	5,268,200	90.80
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,683,000	6,426,000	96.15
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	18,954,000	18,646,000	98.38
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	488,790,000	488,790,000	100.00
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	39,000,000	37,305,000	95.65
12	Penyediaan jasa penunjang Kinerja SKPD	358,631,424	309,437,169	86.28
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	362,976,008	347,627,500	95.77
13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	0	0	-
14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	59,200,000	55,934,300	94.48
15	Pengadaan peralatan gedung kantor	290,550,808	279,542,200	96.21
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor	13,225,200	12,151,000	91.88
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18,000,000	11,000,000	61.11
17	Pendidikan dan pelatihan formal	18,000,000	11,000,000	61.11
4	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	6,299,950	6,293,900	99.90
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,299,950	6,293,900	99.90
5	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	39,954,850	39,154,800	98.00
19	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	39,954,850	39,154,800	98.00
6	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	618,303,050	357,329,300	57.79
20	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	8,035,000	2,090,600	26.02
21	Penyebarluasan informasi bursa tenaga Kerja	276,480,250	124,807,400	45.14

22	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	22,956,100	17,532,000	76.37
23	Penyiapan Tenaga kerja siap pakai	124,284,000	78,091,000	62.83
24	Pengembangan Kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan	74,578,300	34,628,900	46.43
25	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	111,969,400	100,179,400	89.47
7	Program Perlindungan dan pengembangan lembaga Ketenagakerjaan	166,294,500	119,004,500	71.56
26	Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industri	64,775,000	30,290,000	46.76
27	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	27,520,000	19,530,000	70.97
28	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	58,529,000	57,509,000	98.26
29	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15,470,500	11,675,500	75.47
8	Program Kerjasama Informasi dengan mas Media	15,000,000	15,000,000	100.00
30	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	15,000,000	15,000,000	100.00
9	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	505,893,000	491,008,308	97.06
31	Pengembangan potensi unggulan daerah	505,893,000	491,008,308	97.06
10	Program Peningkatan IPTEK sistem produksi	854,046,000	484,407,800	56.72
32	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	854,046,000	484,407,800	56.72
11	Program Pengembangan Industri kecil dan menengah	27,000,000	21,233,600	78.64

33	Pembinaan bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	27,000,000	21,233,600	78.64
12	Program Peningkatan kemampuan teknologi industri	202,500,000	178,105,738	87.95
34	Pembinaan kemampuan teknologi industri	202,500,000	178,105,738	87.95
13	Program Penataan struktur industri	2,826,365,500	2,198,948,878	77.80
35	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	639,453,200	162,968,500	25.49
36	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	187,136,300	140,612,700	75.14
37	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri (DAK)	1,999,776,000	1,895,367,678	94.78
14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	6,299,900	6,208,400	98.55
38	Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Dan Rencana Kerja (Renja) SKPD	6,299,900	6,208,400	98.55
	JUMLAH	6,789,455,669	5,340,665,774	78.66

M. UPT. BLK

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	REALISASI	
			Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	365,477,716	271,711,215	74.34%
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	129,549,732	54,956,076	42.42%
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	11,175,300	7,967,050	71.29%
3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3,600,000	130,000	3.61%

4	Penyediaan alat tulis kantor	8,983,600	6,629,000	73.79%
5	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	1,349,700	1,175,100	87.06%
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,696,600	2,241,000	83.10%
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2,250,000	2,250,000	100.00 %
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,800,000	1,680,000	93.33%
9	Penyediaan makanan dan minuman	2,250,000	270,000	12.00%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70,000,000	65,534,850	93.62%
11	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	131,822,784	128,878,139	97.77%
2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,073,571,910	463,494,700	43.17%
1	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	30,600,000	27,000,000	88.24%
2	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	45,000,000	45,000,000	100.00 %
3	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK	647,971,910	167,141,000	25.79%
4	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	350,000,000	224,353,700	64.10%
JUMLAH		1,439,049,626	735,205,915	51.09%

- Untuk Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2020 dapat dilihat pada point 1 di atas. Data tidak dapat dibandingkan per program dan kegiatan karena Pada Tahun 2020 dilakukan penyederhanaan Nomenklatur Program dan kegiatan sehingga jauh berbeda dengan Tahun 2019, namun dapat disajikan perbandingan ringkasan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tahun 2019 dan tahun 2020.

Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2019 terhadap 2020

- BELANJA TIDAK LANGSUNG

Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2019 :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Gaji dan tunjangan	3.635.823.118	2.699.749.243	74,25
2.	Tambahan penghasilan berdasarkan beban	2.927.439.809	2.797.802.220	95,57

	kerja			
--	-------	--	--	--

Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2020 :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real- iasasi
1.	Gaji dan tunjangan	4.223.871.255	2.598.065.086	61,51
2.	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	2.989.425.759	2.373.055.960	79,38

- BELANJA LANGSUNG

Perbandingan Realisasi Belanja Langsung
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2019 dan 2020

No	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	% Pening- katan/Penurunan
	BELANJA LANGSUNG	6.075.871.689	2.979.683.731	(50,95)
	Belanja Pegawai	207.014.000	0	(100)
	Belanja Barang/ Jasa	3.450.448.743	2.465.843.190	(28,53)
	Belanja Modal	2.418.408.946	513.840.541	(78,75)

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2020. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui LAPKIN ini.

Secara umum rata-rata pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sesuai Rencana Stratejik Tahun 2018-2023 yang terdiri atas 5 (lima) sasaran dalam tahun 2020 telah mencapai target yang telah ditentukan walaupun ada 2 (dua) sasaran yang tidak tercapai 100 %, untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	70,3 %	72,03%	102,46%
2	Meningkatnya pelayanan penempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	5,5 %	7,13%	129,66%
3	Hubungan industrial harmonis dan kondusif	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	25 %	19%	76%
4	Meningkatnya kontribusi sektor industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	14,17 %	12.49%	88%
5	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip Dinaskerind	BB (71)	BB (71,40)	100,56%

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut Tahun 2020, semoga memberikan informasi yang berarti bagi yang memerlukan serta menjadi tolok ukur terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

1. Bidang Ketenaga kerjaan sebagai urusan wajib tentunya akan memperoleh perhatian dalam peningkatan kualitas SDM, anggaran, dan peralatan dalam rangka meminimalisasi peta kerawanan ketenaga kerjaan dan membekali calon tenaga kerja yang terampil dalam mempersiapkan memasuki dunia kerja di Kabupaten Tanah Laut.
2. Bidang Perindustrian
 - a. Sebagai urusan pilihan namun memiliki peran yang cukup strategis sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku industri kecil menengah dengan pembangunan sentra IKM.
 - b. Sebagai daerah yang termasuk dalam pembangunan proyek strategi nasional, pembangunan kawasan industri jorong terus didorong percepatan pembangunan dan pengelolaan nya.
3. Dalam rangka mewujudkan kebijakan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan perindustrian, dilakukan melalui strategi :
 1. Penguatan regulasi di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian
 2. Penguatan kelembagaan dan personil
 3. Membangun jaringan kerja
 4. Pemanfaatan teknologi informasi

Pelaihari, 28 Januari 2021

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,

LAMPIRAN

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut Tahun 2020, semoga memberikan informasi yang berarti bagi yang memerlukan serta menjadi tolok ukur terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

1. Bidang Ketenaga kerjaan sebagai urusan wajib tentunya akan memperoleh perhatian dalam peningkatan kualitas SDM, anggaran, dan peralatan dalam rangka meminimalisasi peta kerawanan ketenaga kerjaan dan membekali calon tenaga kerja yang terampil dalam mempersiapkan memasuki dunia kerja di Kabupaten Tanah Laut.
2. Bidang Perindustrian
 - a. Sebagai urusan pilihan namun memiliki peran yang cukup strategis sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku industri kecil menengah dengan pembangunan sentra IKM.
 - b. Sebagai daerah yang termasuk dalam pembangunan proyek strategi nasional, pembangunan kawasan industri jorong terus didorong percepatan pembangunan dan pengelolaan nya.
3. Dalam rangka mewujudkan kebijakan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan perindustrian, dilakukan melalui strategi :
 1. Penguatan regulasi di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian
 2. Penguatan kelembagaan dan personil
 3. Membangun jaringan kerja
 4. Pemanfaatan teknologi informasi

Pelaihari, 28 Januari 2021

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,


MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) ini disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggung jawab pelaksanaan kinerja untuk Tahun 2020.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut di masa - masa mendatang..... Aamiin.

Pelaihari, 28 Januari 2021

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,

MASTURI, S.STP

NIP. 19770705 199612 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tentang capaian kinerja, sasaran selama tahun 2020 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategik tahun 2018-2023 dan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2020.

Pada Tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut menetapkan 14 (empat belas) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 10.782.249.285,-** dan realisasi sebesar **Rp. 7.950.804.777,-** atau sebesar 73,74 %. Secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2020 sudah cukup baik.

Demikian dengan disusunnya LAPKIN ini dapat memberikan informasi dan manfaat serta evaluasi dalam pengambilan keputusan guna lebih mendorong peningkatan kinerja maupun kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Tanah Laut dimasa yang akan datang.

Pelaihari, 28 Januari 2021

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004